

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DEGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan : No. 206/Pid.B/2013/PN.Mks)

ANDI SITI ASMA KURNIA

B 111 09 182



**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DEGAN PEMBERATAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan : No. 206/Pid.B/2013/PN.Mks)**

**disusun dan diajukan oleh
ANDI SITI ASMA KURNIA
B 111 09 182**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DEGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan : No. 206/Pid.B/2013/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

ANDI SITI ASMA KURNIA

B 111 09 182

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 12 Juni 2014
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua


Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H.

NIP. 19620105 198601 1 001

Sekretaris


Hj. Nur Azisa, S.H.,M.H.

NIP. 19671010 199202 2 002

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi mahasiswa

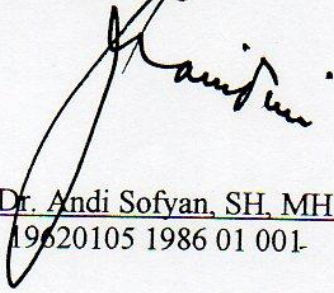
Nama	Andi Siti Asma Kurnia
Nomor Induk Mahasiswa	B 111 09 182
Program Studi	Ilmu Hukum
Bagian	Hukum Pidana
Judul Proposal	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 206/Pid. B/2013/Pn. Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

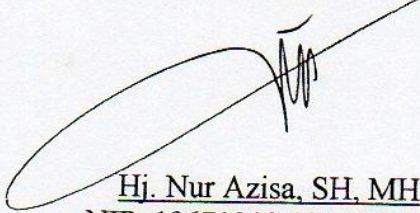
Makassar, Mei 2014

Mengetahui,

Pembimbing I


Prof. Dr. Andi Sofyan, SH, MH
NIP. 19620105 1986 01 001

Pembimbing II


Hj. Nur Azisa, SH, MH
NIP. 19671010 1992 02 002

PERSETUJUAN MENEMPUPH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **ANDI SITI ASMA KURNIA**
No. Pokok : B111 09 182
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar No.206/Pid.B/2013/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

ANDI SITI ASMA KURNIA, (B. 111 09 182) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.206/Pid.B/2013/PN. Mks), dibawah bimbingan Bapak Guru BesarAndiSofyan sebagai Pembimbing I dan Ibu Hj. Nur Azisa sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan pidana materil tentang tidak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur (Studi Kasus Putusan No.206/Pid.B/2013/PN.Mks) dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi hukum tindakan yang menyerahkan terdakwa kepada lembaga panti social untuk dididik dan dibina dalam program latihan kerja.

Penelitian dilakukan pada Kantor Pengadilan Negeri Makassar dengan teknik pengumpulan dokumentasi berupa putusan pengadilan dan berkas-berkas yang terkait. Hasil pengumpulan data primer dan sekunder dianalisis menurut metode kualitatif deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai fenomena hukum yang terjadi.

Hasil-hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pidana materil terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, penerapan hukumnya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan ancaman sanksi pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa yang semuanya bersesuaian dimana terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu memberi pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dapat menerima saksi hukum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang tidak menjatuhkan pidana penjara yang kurang tepat menurut penilaiannya, melainkan sanksi hukum berupa tindakan yang menyerahkan terdakwa pada Panti Sosial Marsidi Putra Toddopuli Makassar selama 7 (tujuh) bulan potong selama terdakwa dalam tahanan.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap terdakwa dalam Putusan No.206/Pid.B/2013/PN Makassar telah sesuai dengan KUHP, berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dengan dua alat bukti dalam persidangan, serta pertimbangan yuridis hakim dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dengan memperhatikan undang-undang yang terkait, serta diperkuat dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat, Hidayah dan Taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan pembahasan ini dalam bentuk skripsi, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Perlu dikemukakan bahwa dalam penelitian dan pembahasan skripsi ini masih dalam bentuk yang sederhana, dan tidak tertutup kemungkinan di dalamnya terdapat kelemahan dan kekurangan. Karena itu penulis bersedia menerima kritik sehat yang bersifat membangun demi kesempurnaannya.

Selanjutnya Penulis aturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, Ayahanda Drs. H.AchmadKurnia, MM., dan Ibunda Hj. A. Tenri Sangka tercinta yang telah membina, mendidik, membesarkan dan mengayomi Anakda tanpa pamrih, dan rela membanting tulang demi kebutuhan Penulis sampai saat ini, serta terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Adik Saya Andi Ahmad Khaidir dan keluarga besar penulis yang selalu berdoa yang terbaik untuk Penulis sehingga tibalah saatnya untuk menyelesaikan studi.

Selain dari itu pada kesempatan yang berharga ini penulis tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih terutama kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.

2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H, M.Si, DFM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan Pembantu Dekan I, II, dan III, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH. selaku Penasehat Akademik bagi Penulis.
4. Bapak Prof. Dr, Andi Sofyan, S.H, M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Nur Azisa, S.H, M.H., selaku Pembimbing II yang selalu memberikan waktu dengan kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi bimbingan, saran, petunjuk, dan kritik yang membangun dari awal hingga selesainya skripsi ini yang Insya Allah selalu penulis ingat.
5. Bapak Prof. H. M. Imran Arief, SH., MH dan Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H, M.H. selaku penguji yang telah memberikan saran dan masukan selama penyusunan dan ujian skripsi.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Staf Bagian Hukum Pidana serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberi ilmu, nasehat dan melayani urusan administrasi.
7. Bapak Dr, H. Zulfahmi, S,H, M.N, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Makassar dan semua pihak yang membantu dalam penelitian.
8. Sahabat saya yang selalu saya rindukan dan selalu mendukung saya Almh. Rathni Risky Novianti.SH yang selalu mendukung saya dalam susah dan senang.
9. Sahabat saya antara lain Zilva Sechan Bachmid, Lisa, Tria Hadiastuti, Meutia Nadjib, Mentari Muchadar, Nalia Mutiara dini, Anta Yasin, Imam Ahim, Fadhlur Rohman, Gilang Andika Gunawan, Fadli Gumanti, Eko

minsyah syahputra, Muh.Tizar, Ivon yuania sampedang dan lain-lain yang tidak sempat disebutkan satu-persatu.

10.Teman-teman doktrin 2009, dan juga rekan-rekan kkn gel.82.

khususnya desa Abbanuange Kecamatan Lilirilau Kab. Soppeng.

11.Yang selalu ada disamping saya dan mendukung saya Rahmat Hidayat

12.Anak-anak Citra Sudiang; Malik, Fandi, Mamat, Irfan, Dimas, Yama, Rifai, Salman dan lain-lain.

Kepada semua pihak yang berkenaan telah memberi bantuan baik materiel maupun moril, semoga mendapat imbalan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt, Amin !

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMANJUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	10
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	13
1. Pengertian Pencurian	13
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian	15
C. Anak	20
1. Pengertian Anak	21
2. Hak-hakAnak	22
3. Kewajiban-kewajiban Anak.....	26
D. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	28
1. Anak Usia Belum Dewasa	29
2. Peradilan Pidana Anak	32

3. Penanggulangan Kenakalan Anak	36
E. Sanksi Pidana dan Tindakan Bagi Anak.....	38
1. Sanksi Pidana	39
2. Sanksi Tindakan	41
3. Pemidanaan Anak	43
F. Putusan Hakim	46
1. Putusan Bebas Murni	47
2. Putusan Lepas dari Dakwaan atau Putusan Bebas	47
3. Putusan Pemidanaan	48
BABIII METODE PENELITIAN	50
A. Lokasi Penelitian	50
B. Teknik Pengumpulan Data.....	50
C. Jenis dan Sumber Data.....	51
D. Metode Analisis Data	52
BABIV HASH PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Penerapan Hukum Materil Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.206/Pid.B/2013/PN. Mks).....	53
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tentang Tindak Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.206/ Pid.B/2013/PN. Mks	83
BABV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergaulan manusia dalam Interaksi sosial masyarakat telah menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi, politik, dan hukum dalam pembangunan baik yang bersifat positif maupun negatif. Salah satu diantaranya dalam bidang hukum adalah merebaknya tindak pidana kejahatan yang perlu segera ditanggulangi baik preventif dan persuasif maupun represif guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penanggulangan kejahatan mutlak diperlukan mengingat bahwa dewasa ini semakin meresahkan segenap lapisan masyarakat, mulai dari kawasan perkotaan hingga ke pelosok pedesaan. Peran para aparat penegak hukum sangat diperlukan, guna memberantas berbagai macam kejahatan, minimal meminimalisir tingkat kejahatan yang setiap tahun selalu meningkat, sehingga perlu segera ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat, adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Hal ini yang cukup memprihatinkan baik para orang tua dan guru maupun segenap lapisan masyarakat, sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam penegakan hukum yang lebih mengedepankan aspek edukatif dan mental keagamaan. Dengan demikian diharapkan sikap dan perilaku anak tersebut dapat direhabilitir.

Anak sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa perlu dijaga, dilindungi, dan dipelihara keamanannya baik dari segi fisik maupun mentalnya, menjadi tanggung jawab kita semua khususnya bagi para orang tua di rumah dan guru di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar anak memiliki sikap dan perilaku yang baik sejak usia dini, remaja hingga dewasa yang mampu mandiri dan bertanggung jawab dalam rangka menyongsong kelanjutan hidup dan masa depannya.

Tanpa upaya yang demikian itu maka sulit diharapkan anak memiliki prospek kehidupan yang baik, bahkan ada kemungkinan seorang anak cenderung memiliki sikap dan perilaku yang negatif dan meresahkan semua orang di sekitarnya. Berawal dari hal yang demikian itu menjadi cikal bakal terciptanya perilaku anak yang suka berbuat salah, agar mendapat perhatian dari orang tua. Kecermatan orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak mutlak diperlukan, agar sikap dan perilaku anak tidak menjadi nakal yang kemungkinan berbuat tindak kejahatan.

Dalam konteks yang demikian dapat saja terjadi dan menimpa banyak anak di bawah umur, terlebih mereka hidup dalam era globalisasi informasi dan komunikasi yang semakin ultra modern dewasa ini. Dimana anak dengan mudah mengakses suatu pengetahuan (knowledge), sikap (attitude) dan perilaku (practice) dari berbagai media massa dan elektronik yang sebenarnya tidak layak untuk konsumsi anak. Hal ini membawa dampak negatif dalam perkembangan fisik dan mentalnya, akibatnya anak dapat saja meniru apa yang dilihatnya untuk melakukan tindak pidana penganiayaan, pemerkosaan, perjudian, pencurian dan sebagainya.

Beberapa tindak pidana kejahatan tersebut dapat saja dilakukan oleh anak mulai dari tindak pidana ringan hingga tindak pidana yang dilakukan dengan pemberatan. Semuanya tidak boleh dipandang remeh, demi menjaga masa depan anak sebagai pelanjut generasi yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam berbagai sektor pembangunan. Anak sebagai tunas muda harapan bangsa perlu dibina dan diarahkan untuk tidak berbuat tindak pidana ringan ataupun tindak pidana pencurian dengan pemberatan ataupun dengan kekerasan.

Banyak kasus yang ditemukan dalam interaksi sosial masyarakat di mana anak menjadi pelaku kejahatan dengan tindak pidana pencurian ringan dan pemberatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, kurangnya perhatian orang tua akibat kesibukan sehari-hari, tidak adanya pendidikan budi pekerti dalam kurikulum di sekolah, mudahnya mengakses berbagai program yang tidak layak ditonton anak di internet dan televisi, tekanan ekonomi keluarga, merembesnya pergaulan bebas di kalangan remaja, dan mudahnya mendapatkan narkoba di pasaran bebas.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak sudah sering terjadi, terutama di wilayah perkotaan yang sarat dengan problematik kehidupan sosial budaya dan ekonomi. Kondisi yang demikian menimbulkan keprihatinan warga masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi, baik oleh segenap aparat penegak hukum khususnya kepolisian maupun segenap lapisan masyarakat. Tanpa upaya yang demikian itu, maka sulit diharapkan untuk dapat mencegah anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Begitu pula keadaannya dengan maraknya pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar, hampir setiap

hari ditemukan terjadinya pencurian tergantung situasi dan kondisi yang membuka kesempatan bagi anak dibawah umur untuk melakukannya. Mereka itu bukan hanya dilakukan oleh anak putus sekolah karena himpitan ekonomi, tetapi juga dilakukan oleh anak yang merupakan siswa aktif di sekolah karena kenakalan remaja. Hal ini cukup memprihatinkan dan meresahkan warga masyarakat di Kota Makassar.

Menurut data statistik yang tercatat di Poltabes Makassar tahun 2012 menunjukkan bahwa, selama tahun tersebut telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak sebanyak 265 kasus yang dilaporkan oleh warga masyarakat dari 11 wilayah kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap bulan terjadi 22 kasus pencurian atau rata-rata 2 kasus dalam sebulan pada setiap kecamatan. Angka yang demikian ini cukup tinggi dan memprihatinkan baik aparat kepolisian maupun warga masyarakat kota Makassar, sehingga perlu segera ditanggulangi.

Para pelaku pencurian tersebut pada umumnya melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 s/d ke-5 KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal sembilan tahun (Pasal 363 Ayat (2) KUHP), atau minimal tiga bulan (Pasal 364 KUHP). Oleh karena pelakunya masih tergolong anak di bawah umur, maka para pelaku atau terdakwa diserahkan kepada Kementerian Sosial dalam hal ini antara lain ke Panti Sosial Marsudi Putra Todopuli Makassar untuk mengikuti pendidikan pembinaan dan pelatihan kerja selama masa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim.

Meskipun demikian tidak semua kasus pencurian pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur diselesaikan melalui proses hukum,

karena ada beberapa di antaranya diselesaikan melalui jalur perdamaian. Seperti pencurian di pasar tradisional, super market atau mall, dimana pelaku hanya diwajibkan mengembaiikan barang dengan denda lima kali lipat dari harga barang yang dicurnyai. Hal ini kurang efektif dan tidak memberikan dampak jera bagi pelaku, akan tetapi masih lebih banyak yang diselesaikan melalui jalur hukum, mengedepankan perlindungan hukum atas hak-hak anak demi tegaknya keadilan dan kebenaran.

Salah satu kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur (17 tahun), tempat kejadian perkara di Jl. Dg Tata 1 Blok 4 No. 70 Kelurahan Malingkeri Kecamatan Tamalate Kota Makassar pada hari Ahad tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 12.30 Wita, dalam wilayah hukum Polsekta Tamalate. Kasus ini telah divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa dengan menyerahkan kepada Kementerian Sosial dalam hal ini Panti Sosial Marsudi Putra Todopuli Makassar untuk mengikuti pendidikan pembinaan dan pelatihan kerja selama 7 (tujuh) bulan.

Berdasarkan uraian di atas melandasi pemikfran penulis untuk melakukan penelitian atas putusan tersebut dengan judul: "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.206/Pid. B/2013/PN. Mks).

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang dapat diberi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus putusan Nomor 206/Pid.B/2013/PN Mks ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus putusan Nomor 206/Pid. B/2013/PN Mks ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan pembahasan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberat yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus putusan Nomor 206/Pid.B/2013/PN Mks.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam studi kasus putusan Nomor 206/Pid. B/2013/PN Mks.

Hasil penelitian dan pembahasan ini memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, sebagai referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian kasus yang sama di bidang hukum pidana.
2. Kegunaan praktis, dapat menjadi sumber informasi masyarakat dalam memahami kasus tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam upaya untuk mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana, dapat dijelaskan dalam bahasa berikut ini.

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana antara lain menurut Prodjodikoro (2003 : 59) mengatakan bahwa: "Tindak pidana dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*, atau dalam bahasa Inggris *delict*, berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan subyek tindak pidana".

Sedangkan pengertian yang senada dengan itu antarlain menurut Faried (1987 : 33) mengatakan bahwa: "Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Kedua rumusan pengertian di atas dan segi formulasi kalimatnya memang berbeda, akan tetapi mengandung makna atau maksud yang sama dan dapat disimpulkan bahwa, tindak pidana atau delik adalah suatu perbuatan yang dilarang yang dapat diancam dengan hukuman pidana mulai dari ancaman pidana yang ringan sampai pada ancaman yang pidana berat bagi siapa saja yang melakukannya.

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa subyek dari delik adalah manusia. Selain dari itu subyek delik dapat pula berupa

badan hukum yang dapat bertindak, misalnya kedudukan orang. Hal ini dapat dilihat pada beberapa perumusan tindak pidana dalam KUH Pidana yang menempatkan daya pikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana. Selain dari itu juga nampak pada wujud hukuman atau pemidanaan yang termuat dalam beberapa pasal KUH Pidana seperti hukuman penjara, kurungan, dan denda.

Selanjutnya menurut Chazawi (2005 : 121) mengatakan bahwa delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUH Pidana, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtreding*) dimuat dalam Buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya dibedakan antara tindak pidana dengan sengaja (*Formeel ceficten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana positif dan negatif, dapat pula disebut tindak pidana pasif atau negatif, dan disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissions*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama, atau berlangsung lama, atau berlangsung terus menerus.

- f. Berdasarkan atas sumbernya, maka delik atau tindak pidana itu dapat dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut hukumannya dapat dibedakan antara tindak pidana communica (delicta comunica) yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tindak pidana propria yaitu hanya dapat dilakukan oleh yang memiliki kualitas pribadi tertentu
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana aduan (klacht delicten).
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (envoudige delicten), tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten), dan tindak pidana yang diperingan (depriviligeerde delicten).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan, tindak pidana penipuan dan lain-lain sebagainya.
- k. Dari sudut pandang berapa kali perbuatan itu untuk menjadi suatu larangan juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten), dan tindak pidana yang berangkai (samengestelde deloicten).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana atau delik antara lain dikemukakan oleh Vos dalam saduran Zainal (1987 : 33) sebagai berikut:

- a. Elemen (bagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif).
- b. Elemen akibat dari perbuatan yang terjadi dari suatu delik yang selesai. Elemen akibat ini dianggap telah selesai apabila telah nyata akibat dari suatu perbuatan. Dalam rumusan undang-undang elemen akibat kadang-kadang tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan seperti dalam delik materil.
- c. Elemen subyek yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau culpa (tidak sengaja).
- d. Elemen melawan hukum yaitu telah mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dalam undang-undang tetapi tetap dilanggar dengan sengaja.

Semua elemen tersebut di atas disesuaikan menurut rumusan pasal dalam undang-undang, dapat dibedakan dari segi obyektif, misalnya dalam Pasal 160 KUH Pidana diperlukan elemen atau unsur yaitu di muka umum, sedangkan dari segi subyektif misalnya Pasal 340 KUH Pidana diperlukan elemen atau unsur merencanakan lebih dahulu.

Sehubungan dengan itu menurut Pompe dalam kutipan Poernomo (1981 : 99) menyebutkan ada tiga elemen suatu delik yaitu: Ada unsur melawan hukum, b. unsur kesalahan, dan c. unsur bahaya, gangguan,

dan merugikan orang lain, pihak lain atau masyarakat.

Selanjutnya menurut Lamintang (1984 : 184) mengatakan bahwa: Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dalam undang-undang yang bersangkutan.
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf).
- d. Dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Kartanegara yang dikutip oleh Marpaung (2005 : 10) mengemukakan bahwa: Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

- a. Suatu tindakan.
- b. Suatu akibat, dan
- c. Suatu keadaan (omstandigheid).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subyektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan (toerekeningsvatbaarheid).
- b. Kesalahan (schuld).

Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut Tongat (2002 : 6-7) mengatakan dengan jelas bahwa: Kesalahan (schuld) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu bentuk dolus dan bentuk culpa sebagai berikut :

a. Dolus atau kesengajaan, berarti menghendaki mengetahui (willens an wettens) yang berarti bahwa si pembuat harus mengetahui apa yang dilakukannya. Tingkatan sengaja dibedakan menjadi tiga yaitu:

1) Sengaja sebagai niat, dalam hal ini akibat delik adalah motif utama untuk suatu perbuatan yang seandainya tujuan itu tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan.

2) Sengaja kesadaran akan kepastian, dalam hal ini ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu.

3) Sengaja insaf akan kemungkinan, dalam hal ini dengan melakukan perbuatan itu telah diinsafi kemungkinan yang akan terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu.

b. Culpa atau ketidaksengajaan atau kealpaan, culpa itu baru ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan.

Sehubungan dengan kealpaan atau kekurang hati-hatian tersebut, menurut Effendy (1989 : 20) mengatakan bahwa:

a. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld), dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah timbulnya akibat tersebut.

b. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewustec schuld), dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah kejahatan pencurian yang menjadi sorotan dalam penelitian ini. Karena itu perlu diberikan pengertian pencurian dan jenis-jenis pencurian menurut ketentuan dalam KUH Pidana berikut ini.

1. Pengertian Pencurian

Menurut R. Soesilo (1998 : 249) yang mengomentari Pasal 362 KUH Pidana sebagai berikut:

Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah.

Ini adalah pencurian biasa dengan elemen-elemennya sebagai berikut:

- a. Perbuatan mengambil.
- b. Yang diambil harus sesuatu barang.
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kekayaan milik orang lain.
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Atas penuturan di atas menunjukkan terdapat empat unsur yang terkandung dalam pengertian pencurian yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Unsur mengambil, dalam hal ini mengambil untuk dikuasai, maksudnya sewaktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tangan atau tempat. Bilamana orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan

mencuri, tetapi ia baru mencoba mencuri barang tersebut, sehingga orang itu belum dapat dituduh atau dikategorikan sebagai pencuri.

- b. Unsur sesuatu barang, adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, barang dalam bentuk uang, bahan makanan, pakaian, perhiasan, perkakas, mesin-mesin dan sebagainya, termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan melalui kawat dan pipa.
- c. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, misalnya si A bersama si B membeli sebuah buku sehingga menjadi kepunyaan si A dan si B, kemudian disimpan di rumah si B tanpa sepengetahuan si A, buku tersebut dicari oleh si A. Hal ini menunjukkan si B telah mencuri sebagian dari barang milik si A, meskipun barang itu milik bersama.
- d. Unsur pengambilan, dalam hal ini pengambilan harus sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya. Adapun seseorang yang karena keliru mengambil barang orang lain, hal ini belum dapat dikategorikan pencurian. Apabila seseorang menemukan barang di jalan kemudian diambilnya, dan sudah ada maksud untuk memiliki hal tersebut, hal semacam ini sudah masuk pencurian. Jika pada waktu ia mengambil barang itu terlintas difikirannya untuk menyerahkan kepada polisi, kemudian disimpan di rumahnya dan belum diserahkan pada polisi, maka hal ini sudah termasuk menggelapkan (Pasal 372 KUHP), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada dalam kekuasaannya atau berada di tangannya atau di tempatnya.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Adapun jenis-jenis tindak pidana pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni dalam Pasal 362 yang menyangkut pencurian biasa, Pasal 363 menyangkut pencurian berat, Pasal 364 yang menyangkut pencurian ringan, Pasal 365 pencurian dengan kekerasan, dan Pasal 367 menyangkut pencurian dalam kalangan keluarga.

Khusus Pasal 363 Ayat (1) dan (2) KUH Pidana sebagai salah satu jenis tindak pidana pencurian berat berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - Ke-1. Pencurian ternak;
 - Ke-2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, atau kapal yang terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau banyak perang;
 - Ke-3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
 - Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - Ke-5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun.

Ketentuan Ayat (1) tersebut telah membagi pencurian dalam lima jenis yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat. Semua pencurian tersebut dalam hukum pidana disebut "pencurian dengan pemberatan" atau "pencurian dengan kualifikasi" yang dapat diancam dengan sanksi pidana penjara yang lebih berat.

a. Pencurian hewan.

Menurut R. Soesilo (1998 : 251) yang menjelaskan mengenai pencurian dengan pemberatan untuk jenis atau klasifikasi pencurian hewan atau ternak, sebagai berikut:

Bila barang dicuri itu adalah hewan, dan yang dimaksud dengan hewan, diterangkan dalam Pasal 101 yaitu semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dan sebagainya). Binatang yang berkuku satu (kuda dan keledai) dan babi. Anjing. Ayam, bebek, angsa, itu bukan hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan babi. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seseorang petani yang terpenting.

Rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa, pencurian hewan adalah mengambil milik orang lain secara melawan hukum berupa kerbau, sapi, kambing, kuda, keledai dan babi, adalah milik petani yang paling berharga dan paling utama dalam kehidupannya. Karena itu digolongkan sebagai pencurian dengan pemberatan. Sedangkan pencurian jenis hewan lainnya seperti ayam, itik, bebek, angsa dan sebagainya tidak diklasifikasikan sebagai pencurian hewan dengan pemberatan.

b. Pencurian yang dilakukan pada saat bencana alam.

Klasifikasi atau jenis pencurian ini juga termasuk pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang dijelaskan oleh R. Soesilo (1998: 251) bahwa:

Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam malapetaka seperti gempa bumi, banjir, angin topan dan sebagainya. Pencurian ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedangkan orang-orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka digunakan untuk berbuat kejahatan, adalah orang yang rendah budinya. Antara terjadinya malapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya, artinya kejahatan pencuri benar-benar mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri. Tidak masuk di

sini misalnya seseorang yang mencuri dalam satu rumah dalam kota itu, dan kebetulan saja pada saat itu di bagian kota terjadi kebakaran, karena disini pencuri tidak sengaja memakai kesempatan yang ada karena kebakaran itu.

Dalam konteks yang demikian ini telah mengindikasikan bahwa, beratnya ancaman pidana bagi seseorang yang mencuri karena memanfaatkan kesempatan ketika orang lain ditimpa suatu musibah, sehingga dinilai tidak berprikemanusiaan. Sementara orang-orang di sekitarnya berupaya menyelamatkan jiwa dan hartanya, kemudian penderitaannya ditambah dengan pencurian itu.

c. Pencurian pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Klasifikasi pencurian semacam ini juga termasuk pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang dijelaskan oleh R. Soesilo (1998 : 251) sebagai berikut:

Malam sama dengan waktu antara matahari terbenam dan terbit (lihat Pasal 98). Rumah (woning) sama dengan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan dan tidur dan sebagainya. Sebuah 'gudang' atau 'toko' yang tidak didiami siang dan malam, tidak masuk dalam pengertian rumah. Sebaliknya gubuk', 'kereta', 'perahu', dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan 'rumah', 'pekarangan tertutup' sama dengan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Di sini pencuri harus betul-betul masuk dalam rumah dan sebagainya. Apabila berdiri di luar dan menggaet pakaian melalui jendela dengan tongkat, atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang, tidak masuk di sini.

Kesimpulan dari kutipan tersebut di atas bahwa, pencurian pada malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup, adalah termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan. Oleh karena pencuri

nyata-nyata masuk dalam rumah, atau pekarangan rumah, kemudian mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, sehingga menyusahkan orang tersebut. Sedang yang dilakukan di luar rumah atau pekarangan rumah dengan cara menggunakan alat pengait untuk mengambil barang, walaupun dilakukan pada malam hari, tidak dapat diklasifikasikan sebagai suatu pencurian dengan pemberatan.

d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu

Selanjutnya mengenai pencurian semacam ini juga tergolong dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang dijelaskan R. Soesilo (1998 : 252) bahwa:

Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55), sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 55).

Dalam konteks yang demikian itu dapat disimpulkan bahwa, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih semuanya terlibat dalam aktivitas pencurian dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung. Ini juga termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan. Apabila pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana yang satu bertugas untuk melakukan pencurian dan yang lainnya hanya membantu melancarkan pencurian itu, maka hal yang demikian itu tidak termasuk dalam golongan atau klasifikasi pencurian dengan pemberatan. Dengan demikian ancaman pidananya lebih ringan.

e. Pencurian yang dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau memakai kunci palsu dan pakaian palsu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan.

Pencurian tersebut di atas juga termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh R. Soesilo (1998 : 252) sebagai berikut:

Apabila dalam pencurian itu, si pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan cara membongkar, memecah dan sebagainya. 'Membongkar', sama dengan merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela dan lain-lain. Disini harus ada barang yang dirusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak termasuk dalam pengertian membongkar. 'Memecah', sama dengan merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan sebagainya. 'Memanjat', lihat Pasal 99. 'Anak kunci palsu', lihat Pasal 100. 'Perintah palsu'. Sama dengan sesuatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak sebagai tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah, tetapi ternyata bahwa surat itu adalah palsu. 'Pakaian jabatan palsu' (valsche costuum), sama dengan kostum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai uniform polisi dan pura-pura sebagai seorang polisi dapat masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari sebuah perusahaan partikulier.

Mencermati dan menelaah uraian dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa, pencurian dengan cara membongkar, memecah dan sebagainya di tempat untuk dapat mencuri sesuatu barang adaiah juga termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan yang mendapat sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan klasifikasi pencurian dengan pemberatan lainnya. Hal itu sangat memerlukan tindakan sanksi hukum yang berat, karena sangat merugikan pihak korban, sebab

mengambil barang orang dengan cara yang melawan hukum melalui pengrusakan. Penrusakan itu dilakukan dengan cara-cara mulai dari membongkar tembok rumah, memecah kaca pintu atau jendela, menggunakan anak kunci palsu untuk membuka pintu, memperlihatkan surat perintah palsu sebagai aparat palsu, atau menggunakan pakaian palsu seolah-olah sebagai aparat polisi atau pegawai instansi yang terkait lainnya, dan sebagainya.

Adanya pemberatan hukuman itu karena kelima klasifikasi pencurian tersebut, tergolong sebagai delik gegualifigeerd, yaitu delik biasa ditambah dengan unsur.-unsur yang memberatkan pidana. Hal yang demikian telah dijelaskan lebih lanjut oleh Effendy (1993 : 5-6) sebagai berikut:

Adakalanya unsur-unsur yang meringankan dan memberatkan itu mengenai cara dalam melakukan perbuatan, obyek yang khusus, dan akibat yang khusus dari perbuatan. Misalnya Pasal 362 KUH Pidana mengenai pencurian biasa dan pada Pasal 363 mengenai pencurian berat. Yang dikualifikasikan dalam Pasal 363 ini ialah cara melakukannya pada waktu ada kebakaran, atau dilakukan dengan bersama-sama, maupun karena obyek pencuriannya adaiah hewan. Semuanya sangat merugikan dan sangat melawan hukum.

C. Anak

Pengertian tentang anak dibawah umur telah banyak dikemukakan oleh para pakar hukum dan sosiologi, serta dalam peraturan perundang-undangan baik yang beriakui di Indonesia maupun secara universal dalam deklarasi hak-hak azasi manusia.

1. Pengertian Anak

Pengertian anak secara yuridis formal dirumuskan antara lain dalam Kamus Hukum oleh Puspa (1990 : 66 dan 694) yang mengatakan bahwa: "Anak (Ind), Pupil mindergarije onder voogdeij (Bid), adalah anak yang berada di bawa pengawasan orang tua/wali".

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara etimologi, Muliono, dkk (1998 : 30-31) dengan singkat merumuskan bahwa: "Anak adalah keturunan; anak manusia yang masih kecil ; dst". Hal ini berarti anak yang dimaksud adalah anak masih di bawah umur dewasa yang masih memerlukan pengasuhan, pendidikan, pembinaan, perlindungan dan pengayoman.

Kedua rumusan pengertian di atas walaupun berbeda sudut pandang keilmuan, namun mengandung maksud dan makna yang sama dan dapat disimpulkan bahwa, anak adalah setiap orang yang dilahirkan dan belum berusia dewasa. Dalam konteks yang demikian yang dimaksud anak adalah mereka yang masih bayi, berusia balita atau anak usia dini, anak-anak atau anak usia sekolah (6-15 tahun), dan anak remaja (16-21 tahun) serta belum menikah atau dewasa.

Sehubungan dengan itu cukup menarik apa yang dikemukakan oleh Muniraf (2000 : 12) bahwa: "Anak adalah si buah hati harapan masa depan dan pelanjut keturunan, sehingga perlu dibina dan dijaga baik dari segi perkembangan mental maupun dari segi kebutuhan material demi kelangsungan hidup masa depannya".

Begitu pula yang dikemukakan oleh Soeseno (2001 : 22) bahwa: "Karena anak kita berjuang mencari nafkah halal, karena anak kita

bergumul dengan kerja keras tanpa pamrih, dan karena anak kita menginginkan kehidupan yang layak dunia dan akhirat, serta karena anak yang saleh kita tenteram meninggalkan dunia fana".

Hikmah yang dapat dipetik dari ilustrasi yang dikemukakan di atas antara lain, mengingatkan para orang tua atau wali anak untuk selalu menjaga, memelihara, dan mendidik anak ketika mereka itu sangat membutuhkannya, dan ketika anak masih menggantungkan kehidupannya pada orang tua. Tanpa upaya yang demikian itu, maka sulit diharapkan untuk mendapatkan anak yang beriman dan berperilaku baik.

Perlakuan baik kepada anak mutlak diperkukan karena dapat membuat mereka memperoleh hak-haknya sebagai anak, sehingga pada gilirannya nanti anak dapat menyadari kewajiban-kewajibannya selaku anak yang dapat berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara.

Pembinaan yang sedini mungkin sejak kecil hingga dewasa dapat membentuk sikap dan perilaku anak yang baik, sopan dan satun, yang akhirnya menjadi anak shaleh yang mengamalkan ajaran agama dan menghindari perbuatan mungkar yang menjurus pada kenakalan remaja.

2. Hak-hak Anak

Pada tanggal 20 Nopember 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa telah mensahkan "Deklarasi Hak-hak Anak", yang dalam mukadimahnya, tersirat bahwa: "Ummat manusia berkewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak yang memuat sepuluh azas hak-hak atas anak". (Gultom, 2010 : 45).

Pada prinsipnya kesepuluh azas deklarasi hak-hak atas anak tersebut, dituangkan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak berbunyi:

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin akan terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Bunyi pasal di atas telah mengindikasikan bahwa, kepekaan rasa keadilan dan sikap kepedulian terhadap anak, perlu diukur dari aspek perhatian terhadap upaya-upaya perlindungan terhadap anak-anak yang bermasalah. Perlindungan itu sering dikaitkan dengan masalah-masalah perilaku anak yang dalam keadaan tertentu berbentuk suatu perilaku menyimpang yang menjurus pada tidak pidana.

Kondisi yang demikian perlu menjadi perhatian dengan mengenal bentuk-bentuk perilaku anak yang menyimpang, apa yang menjadi latar belakang atas perilaku tersebut, dan bagaimana upaya untuk dapat menanggulangnya. Semuanya menjadi tugas di atas pundak baik para ahli hukum dan sosiologi, maupun para agamawan dan penegak hukum.

Problem di atas memberikan suatu inspirasi bahwa, pengaturan hak-hak anak sangat diperlukan yang menurut Djamhuri, Natakusumah (2001 : 9) antara lain mengemukakan bahwa:

Pengaturan hak-hak atas anak menjadi kewajiban pemerintah dalam hal ini instansi penegak hukum yang harus mengikutkan masyarakat. Hal ini akan lebih bermanfaat sebagai indikator dalam melihat dan mengevaluasi bagaimana ketentuan hak-hak tersebut diwujudkan dalam hal mengatasi gejala perilaku menyimpang bagi anak yang bermasalah, agar kenalalan anak tindak menjurus pada tindak kriminal dapat diatasi, paling tidak dapat diminimalisir.

Sering kali ditemukan dalam interaksi sosial dan permasalahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Misalnya dalam peradilan pidana anak, dimana anak itu tidak atau kurang mengetahui hak dan

kewajibannya, karena itu perlu mendapat bantuan dan perlindungan dalam pelaksanaannya. Karena perlindungan anak pada perinsipnya juga menyangkut perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban yang mereka miliki sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pentingnya perlindungan anak tersebut dijelaskan oleh Gultom (2010 : 47) mengemukakan bahwa:

Perlindungan anak-anak pada hakekatnya menyangkut tentang kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan tentang hak-hak anak yang didasarkan pertimbangan bahwa anak-anak itu merupakan golongan yang masih rawan dan devendent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik fisik, maupun mental dan sosial.

Hal tersebut di atas dimaksudkan agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan. Mereka berhak meikmati hak-hak dan kebebasannya, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, maupun untuk kepentingan masyarakat, agama, bangsa, dan negaranya.

Menurut Gultom (2012 : 48) yang mengulas hak-hak anak dalam undang-undang perkawinan sebagai berikut:

Dalam beberapa pasal Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Perkawinan, dijumpai hak dan perlindungan anak seperti; (a) Perlindungan dan jaminan hak anak untuk tetap memperoleh pemeliharaan dan pendidikan dalam hal terjadi perceraian, dengan pembebanan biaya atas pemeliharaan dan pendidikan anak terutama kepada bapak (Pasal 41); (b) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 Ayat [1]); (c) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (Pasal 45 Ayat [1]); (d) Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kecuali apabila anak itu yang menghendakinya (Pasal 48); (e) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua,

berada di bawah kekuasaan wali, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Pasal 50); (f) Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya, maka atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan, maka yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut (Pasal 54).

Sehubungan dengan itu dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan oleh Gultom (2012 : 48)

sebagai berikut:

Hak-hak anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak adalah: (a) Berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4); (b) Berhak atas sesuatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5); (c) Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6); (d) Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7); (e) Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8); (f) Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka untuk pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus (Pasal 9); (g) Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10); (h) Berhak untuk memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11); (i) Setiap anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12); (j) Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, dan ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya (Pasal 13); (k) Berhak untuk diatur diasuh oleh orang tua sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14); (l) Berhak untuk memperoleh perlindungan diri; penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam pelibatan sengketa, kerusuhan sosial, peristiwa kekerasan,

dan pelibatan dalam suatu peperangan (Pasal 15); (m) Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dst (Pasal 16); (n) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk; mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, dst; (Pasal 17); (o) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Diantara sekian banyak pasal tersebut di atas, salah satu diantaranya adalah Pasal 18 yang berbunyi: "Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya", menjadi sorotan dalam penelitian dan pembahasan ini. Khususnya bagi anak yang masih di bawah umur yang melakukan pencurian dengan pemberatan. Mungkin anak itu kurang mendapat perhatian dan pengajaran dari orang tua, atau tekanan ekonomi keluarga demikian menghimpit dan sebagainya, sehingga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, karena itu perlu diberi bantuan hukum.

3. Kewajiban-kewajiban Anak

Selain hak-hak atas anak juga dalam undang-undang perlindungan anak diatur mengenai kewajiban-kewajiban atas anak, yang lebih lanjut dijelaskan oleh Gultom (2012 : 51) sebagai berikut:

Mengenai kewajiban-kewajiban anak diatur dalam Pasal 19 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menentukan dan menetapkan bahwa, setiap anak berkewajiban untuk: (a) Menghormati orang tua, wali dan guru; (b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; (c) Mencintai tanah air, bangsa dan Negara; (d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing; dan (e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Kewajiban anak untuk selalu menghormati orang tua, wali dan guru, adalah suatu hal yang mutlak, karena mereka itu adalah pemelihara,

pelindung, pengasuh, dan pendidik anak terdepan. Dalam belaian kasihnyalah sehingga anak tumbuh dari bayi, menjadi anak usia dini, anak usia sekolah, anak remaja, dan anak shaleh yang telah dewasa dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Hormat kepada orang tua adalah kewajiban mulia, terlebih hormat pada ibu mutlak diperlukan, karena surga itu di bawah telapak kaki ibu.

Sedangkan kewajiban anak untuk selalu mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, juga tidak kalah pentingnya karena mencintai keluarga dapat menginspirasi anak untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua dan sanak saudara. Mencintai masyarakat di sekitarnya dapat memperkuat persaudaraan anak dalam interaksi sosial, dan menyayangi teman sebaya dan menghormati teman yang lebih tua, sehingga tercipta suatu pertemanan yang aman dan tenteram.

Berikutnya adalah kewajiban anak untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara memang sangat diperlukan, mengingat bahwa sejak kecil anak sudah harus memiliki rasa kebanggaan terhadap tanah air, minimal sudah merasa bangga akan kampung halamannya dimana ia dilahirkan, sudah menjadi cikal bakal cinta tanah air hingga anak menjadi dewasa. Karena itu pada gilirannya dapat dipastikan akan semakin cinta dan bangga atas eksistensi bangsa dan negaranya, pada usia dewasa siap mati dalam membela tanah air.

Selanjutnya kewajiban anak untuk selalu menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, adalah mutlak diperlukan karena anak sedini mungkin sudah harus ditanamkan rasa takut akan dosa dan senang atas segala kebajikan. Mereka sudah perlu diberi pengajaran akhlak dan

ibadah menurut agama yang harus diyakinkan oleh orang tua. Misalnya bagi anak muslim perlu diajari ngaji shalat pada usia tujuh tahun, apabila usia sepuluh tahun tak ngaji dan shalat, maka anak perlu diberi sanksi berupa pukulan yang bersifat mendidik.

Terakhir kewajiban anak untuk selalu melaksanakan etika dan akhlak yang mulia, adalah suatu sikap dan perilaku yang diharapkan orang tua agar dimiliki anak-anaknya. Karena anak akan selalu mengingat petua-petua orang tua dan guru kelak jika memasuki usia dewasa. Mereka tidak mudah terpengaruh akan kondisi kehidupan yang meninabobokan, anak, akan berbuat baik dengan beribadah tanpa memandang sesuatu yang lebih baik di atasnya dan mensyukuri apa yang ada. Dengan demikian mereka dihargai dan dihormati warga masyarakat di sekitarnya.

D. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak sebagai anugerah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir tergolong mahluk lemah, masih murni dari noda dan dosa. Hanya orang tuanyalah yang akan menjadikannya sebagai anak yang berakhlak mulia, besikap dan berperilaku baik, beriman dan berilmu pengetahuan luas, sehingga jadilah ia selaku anak yang telah dewasa berbakti untuk kepentingan keluarga, agama, bangsa dan negara.

Karena itu mengasuh dan mendidik anak harus dilakukan sejak dini ketika ia belum memasuki usia dewasa, agar sikap, tingkah laku, dan perbuatannya tidak menjurus pada tindak pidana kejahatan yang sering ditemukan dewasa ini.

1. Anak Usia Belum Dewasa

Pengertian tentang apa yang dimaksud dengan anak usia belum dewasa, antara lain dikemukakan oleh Sianturi (1996 : 259) sebagai berikut:

Anak yang belum dewasa secara yuridis formal adalah memiliki batasa-batasan sebagai berikut:

- a. Seorang anak yang belum mencapai usia/umur 10 tahun, jika melakukan suatu tindak pidana, tidak dipidana, akan tetapi harus mendapat pendidikan paksa dari pemerintah.
- b. Jika seorang anak usianya antara 10 tahun sampai dengan 16 tahun melakukan suatu tindak pidana, dan sudah berakal, anak itu harus dipidana dengan pengurangan hukuman sepertiga dari ancaman pidana. Tetapi jika belum berakal, anak itu tidak dipidana, akan tetapi harus diperintahkan oleh hakim pidana untuk dididik paksa oleh pemerintah sampai anak itu/vxm berumur 18 tahun.
- c. Seorang anak yang sudah tevensia 16 tahun atau tetoh, jika melakukan suatu tindak pidana, harus dipidana.

Batas-batas pengertian mengenai anak di bawah umur dan belum dewasa di atas cukup jelas, akan tetapi masih perlu dilengkapi dengan batasan pengertian dari beberapa aspek, antara lain menurut Siregar, dkk (1996 : 3) mengatakan bahwa:

Batas si anak masuk tergolong sebagai anak, terdapat perbedaan penentuan. Menurut agama Islam batasan itu tidak berdasar batasan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi si anak pria, demikian pula si anak wanita. Sedangkan dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum yang tertulis, ditetapkan batasan umur sekian. Sebutlah 16 tahun atau 18 tahun, ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itu si anak bukan lagi tergolong anak, tetapi sudah ternasuk sebagai golongan orang dewasa. Karena itu tentang golongan anak ini akan ada perbedaan antara tanggung jawab perbuatan pidana dan perdata.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, berbunyi: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah/vxm

kawin". Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 8 berbunyi: "Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menyimpang dari norma yang dianut masyarakatnya". Hal inilah yang menjadi sorotan dalam penelitian ini yakni anak yang melakukan pencurian dengan pemberatan.

Mencermati kedua batasan umur anak yang dikemukakan para pakar tersebut dapat disimpulkan bahwa, dari segi usia batas yang disebut anak secara yuridis formal antara 10 tahun sampai dengan 21 tahun. Sedangkan dari segi hukum tidak tertulis dan hukum agama Islam tidak di dasarkan batas usia anak melainkan batas anak sudah baligh yang memperlihatkan tanda-tanda fisik sudah berotot dan gejala seksual, seperti menstulasi dan sebagainya.

Sebelum anak itu beranjak dewasa yang melewati usia 21 tahun ke atas, diperlukan pembinaan dan pendidikan bagi anak-anak mulai dari pendidikan informal Taman Kanak-kanak(TK) atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); pendidikan formal Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau SMP, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau SMA/SMK, hingga masuk Perguruan Tinggi atau Universitas, anak perlu diberi pembinaan dan pengayoman terus-menerus oleh orang tua/wali di lingkungan rumah tangga, dan oleh guru dan dosen di lingkungan sekolah/kampus. Dengan demikian maka anak dapat dihindarkan dari perbuatan kenakalan ataucak kejahatan yang menjurus pada tidak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak berbunyi:

Yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; dan
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang masih midup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Adapun batas usia anak telah tertera dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Uundang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa: "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin". Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: "Anak adalah seorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan". Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: "Anak adalah seseorang berumur belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Nomor 1/PUU-VI11/2010 yang menyatakan bahwa: "Batas usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 (dua belas) tahun dan belum pernah kawin".

Putusan Mahkama Konstitusi tersebut yang menetapkan batas usia 12 (dua belas) tahun lebih menjamin hak-hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 22B ayat (2) Undang Undang Dasar Tahun 1945. Karena itu

menurut Mahkamah Konstitusi batas umur 8 (delapan) tahun bagi anak untuk dapat diajukan ke persidangan dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun untuk dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, secara faktual relatif rendah. Penjelasan Undang Undang Pengadilan Anak menentukan batas 8 (delapan) tahun secara sosiologis, psikologis, dan pedagogis anak dapat dianggap sudah mempunyai rasa tanggung jawab. Namun Mahkamah Konstitusi berpendapat fakta hukum menunjukkan adanya beberapa permasalahan dalam proses penyidikan, penahanan, dan persisangan, sehingga menciderai hak konstitusional anak yang dijamin dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945.

2. Peradilan Pidana Anak

Sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada prinsipnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah "kenakaian anak" yang mengacu pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Setelah ditetapkan Undang Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi "Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)", dan saat ini Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menggunakan istilah "Anak yang Berkonflik dengan Hukum", Hal ini selaras dengan hak-hak anak, tujuan peradilan pidana anak untuk melindungi dan memberi keadilan kepada anak.

a. Hak-hak Anak dalam Peradilan Pidana

Anak yang masih tergolong di bawah umur dewasa memerlukan perlindungan hukum dengan mengedepankan sebagai hak-hak anak,

yang menurut Siregar, dkk (1996 : 25) mengemukakan bahwa:

Pemikiran dan usaha-usaha ke arah peradilan anak telah dimulai sejak tahun 1958 dengan diadakannya sidang pengadilan anak yang berbeda dengan sidang pengadilan yang berlaku untuk orang dewasa. Usaha ini didasari dengan pemikiran bahwa, terhadap anak yang melakukan kenakaian harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Perbedaan sidang anak dengan sidang untuk orang dewasa itu merupakan hasil pembicaraan antara instansi yang terlibat dalam menangani masalah-masalah kenakaian anak yaitu Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pra Yuwana.

Menanggapi apa yang dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa, untuk anak nakal yang diajukan pada sidang anak, perlu ditangani oleh hakim yang khusus menangani perkara anak, jaksa yang khusus juga menangani perkara anak, polisi wanita yang paling cocok untuk penyelidikan dan penyidikan perkara pidana anak. Salah satu diantaranya, anak yang di bawah umur melakukan pencurian dengan pemberatan, perlu mendapat perlindungan hak-hak mereka.

b. Tujuan Peradilan Pidana Anak.

Tujuan peradilan pidana anak di bawah umur telah tercantum dalam Pasal 3 Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi: "Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak.bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang ini".

Menurut Gultom (2010 : 77) menjelaskan tujuan peradilan anak sebagai berikut:

Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik untuk anak, tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakatan demi tegaknya keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU No.4 Tahun 2004, dan Pasal 3 UU No.3 Tahun 1997.

Kata terpenting dalam ketentuan di atas, adalah "mengadili". Perbuatan mengadili berintikan mewujudkan keadilan dan kebenaran. hakim dalam melakukan kegiatan dan tindakan-tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu, serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, kemudian memberikan kesimpulan dan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Kenakalan anak dewasa ini sudah sangat memprihatinkan, karena hampir semua jenis kejahatan pernah dilakukan oleh anak yang masih tergolong di bawah umur. Hal ini dapat dilihat dalam interaksi sosial masyarakat, dalam berita-berita media cetak, terlebih tayangan media elektronik via internet televisi, dan telpon seluler. Semuanya telah menginspirasi sebagian anak untuk mengakses perilaku yang menjurus pada perbuatan kekerasan dan kejahatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana.

Sehubungan dengan semakin maraknya kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Djamil (2013 : 33) mengemukakan bahwa:

Ada dua kategori perilaku anak sehingga membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. Status Offence, adalah kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, mengumpet barang orang/anak lain, membolos sekolah, atau kabur dari rumah.
- b. Juvenile Delinquency, adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Dalam konteks yang demikian itu berbagai macam kekerasan dan kejahatan yang menjurus pada tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak di bawah umur, antara lain, penganiayaan, perkelahian kelompok, perjudian, perkosaan dan pelecehan seksual, narkoba, penggelapan, pembunuhan, penipuan, perampokan, pencurian dengan pemberatan dan sebagainya. Semuanya memerlukan perhatian khusus dari aparat hukum dan warga masyarakat untuk menanggulangnya baik secara preventif dan persuasif maupun secara represif.

c. Hak-hak Sebelum, Selama, dan Sesudah Persidangan Anak

Ada beberapa hal yang patut dicermati oleh aparat hukum dan masyarakat dalam peradilan anak, khususnya bagi pelaku tindak pidana, misalnya pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yakni sebelum persidangan, selama persidangan, dan sesudah persidangan. Hal ini antara lain dijelaskan oleh Siregar, dkk (1996 : 52-55) sebagai berikut:

- 1) Sebelum persidangan:
 - a) Hak diperlakukan sebagai belum terbukti bersalah.
 - b) Hak untuk mendapatkan suatu perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial dari siapa saja (misalnya, ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan).
 - c) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
 - d) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (misalnya, transport, penyuluhan dari yang berwajib).
- 2) Selama persidangan:
 - a) Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
 - b) Hak mendapatkan pendamping, penasihat hukum selama anak dalam proses persidangan.
 - c) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar

persidangan mengenai dirinya (misalnya, transport, perawatan kesehatan dan lain-lain).

- d) Hak untuk mendapatkan suatu perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial (misalnya berbagai macam ancaman, dan penganiayaan, cara dan tempat penahanan).
- 3) Sesudah persidangan:
- a) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, dan ide mengenai pemasyarakatan.
 - b) Hak untuk mendapatkan suatu perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial dari siapa saja (misalnya, berbagai macam ancaman, penganiayaan, dan pembunuhan).
 - c) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, walinya, atau keluarganya. Anak tidak boleh dilarang bertemu dengan orang tua, wali, dan keluarga.

Semua hak-hak sebelum, selama, dan sesudah persidangan anak sebagaimana yang dikemukakan di atas, harus dipenuhi dan tidak boleh dikebiri atau dilalaikan oleh para petugas yang berwenang, yang menurut Hamzah (2001 : 12) bahwa: "Kealpaan petugas dalam melindungi hak-hak anak baik sebelum persidangan maupun selama persidangan dan setelah persidangan, tergolong pelanggaran HAM".

3. Penanggulang Kenakalan Anak

Penanggulangan tindak kejahatan atau kenakalan anak yang masih tergolong di bawah umur, menurut Kartono dalam kutipan Djamil (2013 : 38-39) mengatakan bahwa: "Upaya penanggulangan kenakalan anak harus dilakukan secara terpadu, dengan tindakan prefentif, tindakan penghukuman, dan tindakan kuratif. Tindakan yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

a. Tindakan prefentif

Tindakan prefentif atau tindakan yang dapat mencegah kejadian kenakalan anak, berupa:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan perbaikan lingkungan yaitu daerah slum kampung-kampung miskin;
- 2) Mendirikan klinik bimbingan psikologis edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan hidup;
- 3) Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja, membentuk kesejahteraan anak-anak, dan mengadakan panti asuhan;
- 4) Memberikan latihan korektif, dan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak remaja yang membutuhkan;
- 5) Membuat badan supervisi dan pengontrolan terhadap kegiatan anak delikuen disertai program yang korektif;
- 6) Mengadakan belajar kelompok, diskusi kelompok, dan kegiatan olah raga yang sehat dalam memasyarakat pada waktu-waktu tertentu;
- 7) Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para remaja delinkuen dan remaja non delinkuen.

b. Tindakan penghukuman

Tindakan hukum bagi remaja delinkuen antara lain berupa menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri hidup susila dan mandiri.

c. Tindakan kuratif

Tindakan kuratif adalah suatu tindakan penyembuhan kenakalan anak dengan bentuk-bentuk sebagai berikut:

- 1) Menghilangkan semua timbulnya sebab-sebab kejahatan;
- 2) Melakukan peruban lingkungan dengan jalan mencari orang tua asuh dan mencari fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak remaja;
- 3) Memidahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial yang lebih baik;
- 4) Memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib, dan disiplin;
- 5) Memanfaatkan waktu senggang di kampus pelatihan untuk lebih membiasakan diri bekerja, belajar, dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi;
- 6) Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan remaja delinkuen bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat;
- 7) Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya;
- 8) Medirikan lapangan olah raga yang representatif di tempat strategis yang menarik remaja menjadi atlit yang berbakat.

E. Sanksi Pidana dan Tindakan Bagi Anak

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana atau delik, telah diatur dalam beberapa

pasal Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, yang terdiri atas:

1. Sanksi Pidana

Sanksi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana atau delik telah diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan, sebagai berikut:

a. Pidana Pokok

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terdiri atas pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana pengawasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pidana Penjara

Pidana penjara bagi anak yang terbukti melakukan tindak pidana telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 berbunyi:

Pidana penjara yang dapat dikenakan kepada anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Berikutnya dalam Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 berbunyi:

Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan delik yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama sepuluh tahun.

Sedangkan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 berbunyi:

Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai usia 12 tahun melakukan delik yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b yaitu menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Terakhir dalam Pasal 26 ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 berbunyi:

Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai usia 12 tahun melakukan delik yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut, dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

2) Pidana Kurungan

Pidana kurungan bagi anak pelaku delik diatur dalam Pasal 27

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 berbunyi:

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana kurungan orang dewasa.

3) Pidana Denda

Pidana denda bagi anak pelaku tindak pidana diatur dalam

Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 berbunyi :

Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak satu perdua dari maksimum ancaman pidana denda dari orang dewasa.

4) Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan terhadap anak pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 berbunyi : Pidana pengawasan anak nakal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a paling singkat tiga bulan dan paling lama dua tahun. Dalam Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 berbunyi:

Apabila terhadap anak nakal sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan jaksa dan bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana atau delik, diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Perampasan Barang-barang Tertentu

Barang yang dapat dirampas adalah barang yang diperoleh dengan kejahatan, atau barang dipakai untuk melakukan delik. Barang-barang yang boleh dirampas harus kepunyaan terhukum.

2) Pembayaran Ganti Rugi

Pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.

2. Sanksi Tindakan

Adapun sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana atau delik, telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang intinya sebagai berikut:

a. Mengembalikan kepada orang tua

Sanksi tindakan terhadap anak nakai yang melakukan tindak pidana yaitu, mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh. Menurut Supramono (2007 : 35) mengatakan bahwa:

Meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, anak tersebut tetap dibawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan-kegiatan kepramukaan dan lain-lain.

b. Menyerahkan kepada Negara

Sanksi tindakan kepada anak pelaku delik yaitu menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja yang menurut Supramono (2007 : 36) mengatakan bahwa:

Apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuh tidak memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial

Mengenai sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana atau delik yaitu, menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Menurut Supramono (2007 : 37) mengatakan bahwa:

Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja di selenggarakan oleh pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial, tetapi dalam hal ini kepentingan anak menghendaki maka hakim dapat menetapkan anak bersangkutan diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan seperti pesantren, panti sosial, dan lembaga social lainnya dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan.

Lebih lanjut mengenai ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang berbunyi

:"Tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang dapat ditetapkan oleh hakim".

Teguran tersebut dimaksudkan sebagai peringatan dari hakim, baik langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan, maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, dan orang tua asuh. Hal ini dimaksudkan agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan.

Mengenai maksud dari syarat tambahan berupa kewajiban untuk melapor secara berkala kepada Pembimbing Kemasyarakatan, bertujuan untuk mengontrol atau memonitoring anak tersebut apakah ia sudah berperilaku baik atau sebaliknya. Dengan demikian pembinaan tetap berkelanjutan hingga selesai masa tindakan.

Ketiga sanksi tindakan tersebut telah menunjukkan bahwa, anak yang belum cukup umur atau belum dewasa yang melakukan delik, pada umumnya tidak dijatuhi sanksi pidana, melainkan hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan. Suatu sanksi yang cukup adil dan bijaksana karena hukuman tindakan lebih mengedepankan pendidikan dan pembinaan.

3. Pemidanaan Anak

Anak yang melakukan tindak pidana dan masih tergolong di bawah umur, apabila perbuatannya terbukti dalam peradilan dapat dikenakan sanksi pidana oleh hakim berupa "tindakan". Karena itu cukup menarik apa yang dikemukakan oleh Djamil (2013 : 33-34) bahwa:

Anak bukan untuk dihukum, sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan

kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal itu belum dapat dikatakan kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang, si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.

Kondisi yang demikian itu yang dapat melatarbelakangi penilaian dan pertimbangan hakim pidana anak, sehingga hanya menjatukan pidana berupa "tindakan" terhadap anak pelaku kejahatan. Dalam Pasal 24 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang berbunyi:

Tindakan yang dapat dilakukan kepada Anak Nakal adalah sebagai berikut:

- (a) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- (b) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- (c) Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Bunyi pasal di atas cukup jelas. bahwa anak di bawah umur tidak dapat dipidana, karena sikap mentalnya masih tergolong labil, sehingga memerlukan pembinaan dan pengayoman. Anak pelaku kejahatan hanya dapat diberi sanksi berupa "tindakan" yang dapat dijelaskan berikut ini.

a. Mengembalikan kepada orang tua

Anak nakal yang dikembalikan kepada orang tua, wali, ataukah orang tua asuh, dilakukan apabila menurut penilaian Hakim Anak masih dapat dibina dengan baik dalam lingkungan orang tua, wali, atau orang tua asuh. Meskipun anak tersebut secara hukum telah diserahkan kepada keluarga tersebut, akan tetapi masih di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Hakim Anak.

b. Menyerahkan kepada Negara

Apabila menurut penilaian dari Hakim Anak, pendidikan dan pembinaan anak tidak dapat lagi dilakukan dalam lingkungan keluarga, maka anak tersebut diserahkan kepada Negara, dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak dan wajib untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Tujuannya untuk memberi keterampilan di bidang pertukangan, pertanian, perbengkelan, perindustrian dan lain-lain. Selasai menjalani tindakan itu anak yang bersangkutan diharapkan dapat menjadi baik dan mampu berdiri sendiri.

c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial

Tindakan lainnya yang dapat dijatuhkan Hakim Anak kepada anak, adalah menyerahkan kepada Kementerian Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan latihan kerja untuk dididik, dibina, dan dikembangkan. Pada dasarnya pendidikan dan pembinaan tersebut diselenggarakan pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak, atau oleh Kementerian Sosial, akan tetapi demi kepentingan anak maka Hakim Anak dapat menetapkan anak tersebut diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan seperti, pesanteren, panti sosial dan beberapa lembaga social lainnya.

Ketiga jenis tindakan tersebut yang dapat diputuskan oleh Hakim Anak, dimana anak yang bersangkutan dapat saja diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang terdekat dan ada dalam wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Gultom (2010 : 131-132) sebagai berikut:

Anak nakal yang diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, harus diperhatikan agama anak bersangkutan. Tindakan disertai teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim sesuai Pasal 24 ayat (2) UU No.3 Ta/vxhmun 1997. Teguran itu berupa peringatan hakim baik secara langsung terhadap anak, atau tidak langsung kepada orang tua, wali atau orang tua asuh. Maksud teguran itu agar anak tidak mengulangi perbuatannya.

Selanjutnya ada beberapa syarat tambahan yang harus diketahui, dimengerti, dan dicermati oleh Hakim Anak dalam menjatuhkan pidana anak yang masih tergolong di bawah umur melakukan suatu kejahatan, sebagai berikut:

- a. Hakim mencermati pelaksanaan kewajiban anak melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan.
- b. Hakim menjatuhkan pidana tindakan, harus memperhatikan berat ringannya tindak pidana kenakalan yang dilakukan oleh anak
- c. Hakim wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh.
- d. Hubungan anak dengan anggota keluarganya dan keadaan lingkungannya.
- e. Hakim wajib memperhatikan catatan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan (Gultom, 20010 : 132)

F. Putusan Hakim

Putusan hakim atau putusan pengadilan tertuang dalam Pasal 1 butir 11 KUHP yang berbunyi:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Prinst (2002 : 162) menjelaskan bahwa: "Putusan hakim atau vonis adalah putusan pengadilan sebagai akhir dari suatu pemeriksaan". Isi dari putusan tersebut dapat berupa putusan murni (*vrij spraak*), lepas dari dakwaan atau bebas (*onslag van rechts vervoolging*), dan pemidanaan, berikut ini.

1. Putusan Bebas Murni

Putusan semacam ini telah banyak dijelaskan oleh para pakar hukum pidana, antara lain menurut Prints (2002 : 162) menjelaskan sebagai berikut:

Putusan murni (*vrij spraak*), adalah putusan bebas murni dijatuhkan apabila dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sama sekali, karena tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, ataupun ada tetapi bukan merupakan tindak pidana.

Sedangkan menurut Hamzah (2002 : 281) menjelaskan putusan bebas murni yang sesuai dengan KUHAP yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:

Putusan bebas murni (*vrij spraak*) dijatuhkan, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwaan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. (Pasal 191 ayat(1) KUHAP).

2. Putusan Lepas dari Dakwaan atau Putusan Bebas

Putusan lepas dari dakwaan jaksa penuntut umum atau putusan bebas (*onslag van rechts vervolging*), antara lain dijelaskan oleh Prints (2002: 162) sebagai berikut:

Putusan lepas dari dakwaan (*onslag van rechts vervolging*), diambil apabila dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti sama sekali, walaupun perbuatan Terdakwa ada, akan tetapi perbuatan itu mungkin saja bukan merupakan tindak pidana, tetapi pasal yang didakwakan tidak mencakup perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Putusan tersebut di atas banyak mengundang suatu tanda tanya, mengapa hakim berpendapat demikian, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Hal ini jelaskan lebih lanjut oleh Hamzah (2002 : 280) sebagai berikut:

Suatu putusan mengenai tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring van het Openbare Ministerie*) jika berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan tidak ada alasan hukum untuk menuntut pidana, misalnya dalam hal delik aduan tidak ada surat pengaduan yang dilampirkan dalam berkas perkara, atau aduan ditarik kembali, atau delik itu telah lewat waktu (*verjaard*), atau alasan *non bis in idem*.

Dalam konteks yang demikian ini mengindikasikan bahwa, terdakwa bebas dari segala dakwaan, karena jaksa selaku penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya. Karena itu jaksa harus lebih teliti dan cermat dalam menyusun dakwaan dan tuntutan, agar dapat lebih akurat dalam pembuktian.

Kelemahan jaksa dalam menyusun dakwaan dan tuntutan menjadi salah satu penyebab ditolaknya dakwaan. Dengan demikian terdakwa bebas dari segala dakwaan dan tuntutan yang harus batal demi hukum.

3. Putusan Pemidanaan

Selain kedua putusan tersebut di atas, hakim pengadilan dapat pula menjatuhkan putusan pemidanaan, hal ini antara lain dijelaskan oleh Hamzah (2002 : 281) sebagai berikut:

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatannya terbukti dan dapat dipidana.

Selanjutnya putusan pemidanaan ini dijelaskan lebih lanjut oleh Prints (2002 : 162-163) sebagai berikut:

Apabila dakwaan dapat dibuktikan maka putusan hakim dapat berupa pemidanaan. Bentuk-bentuk pemidanaan itu seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUH Pidana, terdiri atas:

- Dalam prakteknya apabila pidana yang dijatuhkan oleh hakim kurang dari dua per tiga lamanya yang dituntut oleh penuntut umum, maka penuntut umum akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

- Untuk tindak pidana umum maka putusan pemidanaan itu bersifat alternatif. Artinya apabila dijatuhkan hukuman badan, maka denda tidak dijatuhkan dan sebaliknya.
- Dalam tindak pidana khusus seperti TPK, TPE, maka hukuman ini dapat berbentuk memulasi, yakni di samping dijatuhkan hukuman badan juga dijatuhkan hukuman denda. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 28, 29, 30, 31 dan 32 TPK (Tindak Pidana Khusus).

Di muka telah dijelaskan bahwa putusan pemidanaan itu terdiri atas pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana pengawasan, pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi.

Sedangkan terdakwa membayar biaya perkara adalah rangkaian pidana penjara yang dijatuhkan hakim. Adapun pidana tindakan lebih ditujukan untuk pemidaan anak di bawah umur sebagai pelaku delik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri Makassar yang terletak di Jl. R.A. Kartini Np.23 Telp. 0411 324058 Makassar Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa, putusan pengadilan yang menyangkut salah satu kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur telah dieksekusi, sehingga cukup menarik untuk diteliti, dalam rangka pengembangan kajian bidang hukum pidana anak di Kota Makassar.

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (field research), adalah penelitian yang dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Makassar, dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumentasi, berkas putusan pengadilan atas pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan mulai dari:
 - a. Petikan Putusan No.206/Pid.B/2013/PN. Mks yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.
 - b. Berita Acara Persidangan dan Persidangan Lanjutan yang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera

Pengganti

- c. Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Makassar yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum.
 - d. Surat Tuntutan Pidana dari Kejaksaan Negei Makassar yang ditandatangani oleh Jksa Penuntut Umun.
 - e. Berita Acara Pendapat/Resume yang dibuat dengan sebenarnya atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Knit Reskrim, Penyidik Pembantu, dan Kepala Kepolisian Sektor Tamaiate.
 - f. Bertia Acara Pemeriksaan Saksi-saksi yang ditandatangani oleh para saksi dan Penyidik Pembantu.
 - g. Surat Perintah Penangkapan, Penahanan, dan Penyitaan yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Tamaiate.
2. Penelitian kepustakaan (library research), adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan untuk mendapatkan beberapa referensi yang dijadikan sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini, yaitu:
- a. Perpustakaan dalam kampus Universitas Hasanuddin Makassar
 - b. Perpustakaan umum diluar kampus yang ada di Kota Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian lapangan ini sebagai berikut:

1. Data primer, adalah data yang masih harus dstelusuri secara deskriptif dan kualitatif bersumber dari literatur yang melandasi penelitian ini.

2. Data sekunder, adaiah data penunjang yang diperoleh dari hasil pengumpulan dokumentasi Putusan Pengadilan Negeri Makassar.

D. Metode Analisis Data

Data primer dan dan sekunder yang di peroleh dalam penelitian lapangan, akan dianalisis dengan teori bidang hukum yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Seianjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, untuk menjelaskan situasi dan kondisi yang terjadi sebelum persidangan, selama persidangan, dan sesudah persidangan atas atas salah satu Putusan Pengadilan Anak mengenai kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar tahun 2012.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak

Sebagai bab inti yang menyangkut hasil-hasil penelitian dan pembahasan materi atas Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 206/Pid. B/2013/PN. Mks, hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 yang diawali dengan identitas terdakwa, kronologis terjadinya tindak pidana, dakwaan jaksa, penuntutan terdakwa, keterangan para saksi, penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan untuk sidang pengadilan, amar putusan hakim anak, dan analisis penulis.

1. Identitas Terdakwa:

Nama lengkap : Randa Putra Suranda Mangka
Tempat/tgl lahir : Jakarta, 22 April 1995
Umur : 17 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Puri Taman Sari Jl. Dg Tata 1
Blok 4 No.70 Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas Kelas II

2. Kronologis Terjadinya Tindak Pidana

Pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012, terdakwa Randa Putra Suranda Mangka, umur 17 tahun berada di rumah kost temannya yang bernama Muhammad Afit di Jalan Dg Tata Makassar. Ketika itu terdakwa berkumpul bersama teman-teman yakni Rio, Afit, dan Anca, sekital jam 11.30 Wita, teman terdakwa yang bernama Anca meminjam sepeda motor kepada Rio untuk pergi membeli rokok dan mie. Setelah motor itu dipinjamkan maka teman terdakwa yakni Anoa meminta kepada terdakwa untuk memboncengnya ke toko yang tidak jauh dari rumah kost teman terdakwa. Setiba di depan toko di Jalan Dg Tata Makassar maka teman terdakwa menyuruhnya berhenti, maka teman terdakwa langsung masuk toko dan terdakwa menunggu di luar toko sambil duduk di atas sepeda motor yang dikendarainya. Setelah 10 menit kemudian teman terdakwa keluar dari toko sambil membawa tabung gas 3 (tiga) buah ukuran 3 (tiga) Kg, lalu menyuruh terdakwa segera menghidupkan sepeda motomya lalu pergi. Bersamaan dengan itu terdakwa mendengar suara perempuan berteriak "pencuri ! ..., pencuri !". Lalu pada saat itu terdakwa tancap gas, setelah beberapa meter sepeda motor yang dikendarainya oleng, sehingga terdakwa bersama dengan tabung gas terjatuh dari motor, dan teman terdakwa langsung lari meninggalkan sepeda motor. Begitu juga terdakwa lari meninggalkan sepeda motor, terdakwa berhasil ditangkap oleh seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Setelah terdakwa tertangkap oleh warga dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan.

Informasi yang diperoleh dari Kantor Kepolisian Sektor Tamalate menyatakan bahwa Modus Operandi, terdakwa melakukan pencurian

tabung gas sebanyak 3 (tiga) buah masing berisi 3 (tiga) Kg bersama dengan temannya pada saat itu, karena dalam toko tersebut tidak ada pemiliknya dan situasinya dalam keadaan sepi. Kemudian teman terdakwa merasa mempunyai kesempatan sehingga berani melakukan pencurian. Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, dengan maksud hasil curiannya akan dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk makan bersama-sama dengan teman-temannya pada saat berkumpul di rumah kost temannya.

Peranan terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pada saat itu hanya membantu membonceng temannya untuk pergi membeli rokok dan mie, setelah tiba di toko tersebut maka terdakwa berhenti lalu teman terdakwa yang bernama Anca masuk ke dalam toko, sedangkan terdakwa menunggu di luar toko dan duduk di atas sepeda motor. Setelah teman terdakwa keluar dari toko dan membawa tabung gas 3 (tiga) buah isi masing-masing 3 (tiga) Kg dan langsung naik ke atas sepeda motor, kemudian terdakwa tancap gas motor, namun baru beberapa meter sepeda motor yang dikendarainya oleh dan terjatuh, dan terdakwa tertangkap tangan oleh salah seorang warga setempat.

Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa sebagaimana yang diuraikan di atas, berdampak pada diri terdakwa, terhadap keluarga, dan terdapat lingkungan masyarakat, masing-masing sebagai berikut:

a. Terhadap diri terdakwa

Terdakwa saat itu berstatus sebagai tahanan Kepolisian Sektor Tamalate, pada tahap penyidikan terdakwa diperiksa oleh penyidik atas

kasus melakukan pencurian tabung gas di toko Jalan Dg Tata Makassar, membuat adanya proses hukum yang dialami terdakwa, sehingga terdakwa selalu memikirkan hukuman yang akan diterima nanti bila diputuskan oleh hakim yang akan menjatuhkan hukuman terhadapnya dan ditahan, sejak itu terdakwa tidak bebas seperti biasa karena telah berada dalam status tahanan kepolisian.

b. Terhadap keluarga

Dampak perbuatan terdakwa yang melakukan pencurian, keluarga terdakwa yaitu kakak terdakwa merasa malu atas kelakuan terdakwa, kemudian direpotkan untuk membesuk terdakwa dalam tahanan. Namun demikian kakak terdakwa tetap meluangkan waktu untuk menyelesaikan masalah terdakwa. Kakak terdakwa berharap kepada penegak hukum agar terdakwa diputus dapat diberi hukuman ringan.

c. Terhadap korban

Korban merasa keberatan atas pencurian yang dilakukan terdakwa bersama temannya dimana terdakwa telah membuat korban mengalami kerugian berupa 3 (tiga) buah tabung gas yang sampai saat ini belum diambilnya dan masih berada pada pihak yang berwajib sebagai barang bukti. Oleh karena itu korban merasa keberatan dan menginginkan terdakwa diproses secara hukum sesuai undang-undang yang berlaku.

d. Terhadap pemilik barang bukti

Pemilik barang bukti pencurian yakni pemilik toko sebagai korban pencurian atas 3 (tiga) tabling gas, juga pemilik sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dipinjam teman terdakwa yang masih DPO untuk pergi

ke toko membeli rokok dan mie, ternyata sepeda motor tersebut hanya digunakan untuk mencuri bukan untuk membeli barang tersebut, sehingga sepeda motor itu juga dijadikan sebagai barang bukti oleh kepolisian. Pemilik sepeda motor tersebut merasa sangat dirugikan karena tidak ada lagi kendaraan yang dapat dipakai untuk pergi bekerja. Oleh sebab itu pemilik barang bukti sepeda motor meminta terdakwa agar dijatuhi hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

e. Terhadap lingkungan masyarakat

Masyarakat di lingkungan perumahan kakak kandung terdakwa di Kompleks Perumahan Puri Taman Sari Makassar. Setelah mengetahui perbuatan terdakwa dan terdakwa tertangkap oleh warga masyarakat dan kepolisian akibat perbuatannya yang melakukan pencurian, masyarakat setempat sangat menyayangkan perbuatan terdakwa, Karena itu warga masyarakat tersebut mengharapkan kepada orang tua/wali (kakak) terdakwa agar terdakwa dapat diberi pengawasan yang cukup dengan sebaik-baiknya, dan kemudian dididik untuk selalu berperilaku dan berbuat baik pada jalan yang benar dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

3. Dakwaan Jaksa

Berdasarkan kronologis atau duduk perkara dan keterangan para saksi serta pengakuan tersangka yang telah diurikan diatas, adalah saling bersesuan atau saling berhubungan, maka Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

a. Terdakwa :

Nama lengkap : Randa Putra Suranda Mangka
Tempat/tgl lahir : Jakarta, 22 April 1995
Umur : 17 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Puri Taman Sari Jl. Dg
Tata 1 Blok 4 No.70 Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas Kelas II

b. Penahanan:

Ditahan Penyidik : di Rutan sejak tanggal 31 Desember
2012 s/d 18 Januari 2013.
Perpanjangan Penahanan : di Rutan sejak tanggal 20 Januari
2013 s/d 29 Januari 2013.
Ditahan Penuntut Umum : di Rutan sejak tanggal 30 Januari
2013 s/d 08 Februari 2013.

c. Dakwaan:

Bahwa terdakwa Randa Putra Suranda Mangka secara bersama-sama dengan Muhammada Hamzah Almakassari Alias Anca (DPO), pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2012 sekitar jam 12.30 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2012 bertempat di Jalan Dg Tata Makassar atau setidaknya pada tempat

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg yang seluruhnya milik saksi korban Asriani Musa, atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana saat itu saksi korban sedang berada di toko milik saksi korban. Kemudian saksi korban melihat Muhammad Hamzah Almakassari Alias Anca (DPO) mengambil 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg milik saksi korban yang diletakkan secara bersusun di depan toko milik saksi korban, dan saksi korban melihat terdakwa yang sedang menunggu Muhammad Hamzah Almakassari Alias Anca (DPO) di atas sepeda motor.
- 2) Bahwa setelah saksi korban melihat Muhammad Hamzah Almakassari Alias Anca (DPO), mengambil dan membawa lari 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg tersebut, saksi korban langsung berlari keluar dari toko miliknya dan berteriak "palukka..., palukka ...!", mamun saat itu terdakwa dan Muhammad Hamzah Almakassari Alias Anca (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor berwarna hitam.
- 3) Bahwa saat terdakwa dan Muhammad Hamzah Almakassari Alias Anca (DPO) berusaha untuk melarikan diri, salah seorang pengendara sepeda motor dari arah yang berlawanan berusaha untuk menghalangi sepeda motor yang digunakan oleh dan Muhammad Hamzah Almakassari Alias Anca (DPO), sehingga sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dan Muhammad Hamzah Almakassari Alias Anca (DPO) terjatuh, namun Muhammad Hamzah Almakassari Alias Anca (DPO) berhasil melarikan diri, sehingga yang tertangkap pada saat itu hanya terdakwa dan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg.

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Asriani Musa menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Perbuatan terdakwa dan temannya Muhammad Hamzah Almakassari Alias Anca (DPO) adalah terbukti, sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

4. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana (requisitoir) sesuai dengan uraian kronologis atau duduk perkara dan dakwaan jaksa yang ditujukan kepada terdakwa Randa Putra Suranda Mangka oleh Jaksa Penuntut Umum Haerana Ali Jaya, SH. yang menuntut agar supaya Hakim/Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa Randa Putra Suranda Mangka bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Randa Putra Suranda Mangka dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg dikembalikan kepada saksi korban Ariani Musa.
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DD 2133 Q, warna hitam, dikembalikan kepada saksi Rionaldi Welliam Lahiwu.
- d. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 28 Februari 2013.

5. Keterangan Para Saksi dan Tersangka

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Makassar berupa keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa sebagai berikut:

a. Saksi Asriani Musa

Saksi di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberi keterangan sebenar-benarnya.
- 2) Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- 3) Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Dg Tata 1 Blok 4 No.70 Kota Makassar.
- 4) Bahwa benar 3 (tiga) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) Kg adalah milik saksi korban yang saksi letakkan secara bersusun di depan toko.
- 5) Bahwa benar saksi melihat teman terdakwa (Muhammad Hamzah Almakassari alias Anca - DPO) yang mengambil 3 (tiga) buah tabung tersebut, kemudian saat Muhammad Hamzah Almakassari (DPO) lari, saksi lalu berteriak "palluka..., palukka!".
- 6) Bahwa benar pada saat itu saksi melihat terdakwa yang sedang duduk di atas sepeda motornya sambil menunggu temannya Muhammad Hamzah Almakassari (DPO) yang membawa 3 (tiga) buah tabung gas tersebut.
- 7) Bahwa benar saat terdakwa dan temannya Muhammad Hamzah Almakassari (DPO) berusaha melarikan diri, kemudian dari arah jalan yang berlawanan ada pengguna sepeda motor yang ikut menghalangi jalan yang dilewati terdakwa dan temannya.
- 8) Bahwa benar saat terdakwa dan Muhammad Hamzah Almakassari (DPO) jatuh dari sepeda motornya, maka Muhammad Hamzah Almakassari (DPO) langsung melarikan diri sehingga yang tertangkap oleh warga saat itu hanyalah terdakwa dan 3 (tiga) buah tabung gas milik saksi korban.
- 9) Bahwa benar atas kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

b. Saksi Panca Indera Musa, SE

Saksi tersebut di atas di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- 2) Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- 3) Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu 30 Desember 2012 jam 12.30 Wita di Jl. Dg Tata 1 Blok 4 No.70 Kota Makassar.
- 4) Bahwa benar saat itu saksi berada di dalam rumah/toko milik saksi korban Asriani Musa
- 5) Bahwa benar saat itu saksi mendengar teriakan dari saksi Asriani Musa yang mengatakan "palukka. ., palukka...!".
- 6) Bahwa saat mendengar teriakan tersebut, saksi kemudian keluar dari rumah dan saksi melihat terdakwa dan teman terdakwa Muhammad Hamzah Almakassari (DPO) sudah berada di atas sepeda motornya sambil memegang 3 (tiga) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) Kg.
- 7) Bahwa benar terdakwa dan temannya Muhammad Hamzah Almakassari (DPO) akan melarikan diri, terdakwa sempat dihadang oleh pengendara sepeda motor dari arah yang berlawanan, sehingga terdakwa dan temannya Muhammad Hamzah Almakassari (DPO) terjatuh dari motor, namun yang berhasil ditangkap oleh warga hanyalah terdakwa beserta 3 (tiga) buah tabung gas dan Muhammad Hamzah Almakassari (DPO) berhasil melarikan diri.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

c. Saksi Rionaldi William Lahiwu

Saksi di bawah sumpah dalam persidangan mengatakan sebagai berikut:

- 1) Saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberi keterangan dengan benar.
- 2) Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- 3) Bahwa benar saat itu Muhammad Hamzah Almakassari (DPO) mengatakan kepada saksi akan meminjam sepeda motor Honda

Beat warna hitam milik saksi dengan nomor polisi DD 2133 Q.

- 4) Bahwa benar saat Muhammad Hamzah Almakassari (DPO) akan meminjam motor milik saksi. Muhammad Hamzah Almakassari akan pulang ke rumahnya untuk ganti pakaian dan akan mampir membeli rokok, kemudian saksi menyerahkan kunci motor miliknya kepada Muhammad Hamzah Almakassari (DPO).
- 5) Bahwa benar kemudian Muhammad Hamzah Almakassari (DPO) mengajak terdakwa untuk menemaninya dan selanjutnya terdakwa dan Muhammad Hamzah Almakassari (DPO) pergi.
- 6) Bahwa benar tidak lama kemudian Muhammad Hamzah Almakassari (DPO) mendatangi saksi dan mengatakan bahwa telah mengambil 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg di salah satu toko di Jalan Dg Tata 1 Blok 4 No. 70 Kota Makassar, namun karena tertangkap tangan, sehingga sepeda motor yang digunakan ditahan oleh warga, demikian pula terdakwa, tetapi Muhammad Hamzah Almakassari (DPO) berhasil melarikan diri.

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa

membenarkannya.

d. Terdakwa Randa Putra Suranda Mangka

Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya memberi pengakuan

bahwa:

- 1) Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberi keterangan dengan sebenarnya.
- 2) Terdakwa mengaku dan mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkannya.
- 3) Terdakwa mengaku dan mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa secara bersama-sama telah mengambil 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg milik saksi korban Asriani Musa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 12.30 Wita di Jalan Dg Tata 1 Blok 4 No.70 Kota Makassar.
- 4) Bahwa benar Muhammad Hamzah Almakassari (DPO) yang mengambil 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg tersebut dan terdakwa yang menunggu di atas sepeda motor.
- 5) Bahwa benar awalnya Muhammad Hamzah Almakassari (DPO) mengajak terdakwa untuk ditemani membeli rokok dengan meminjam sepeda motor milik Roinaldi Welliam Lahiwu, kemudian terdakwa membonceng Muhammad Hamzah Almakassari (DPO) turun dari sepeda motor dan terdakwa menunggu di atas sepeda motor, dan selanjutnya tiba-tiba

Muhammad Hamzah Almakassari (DPO) kembali ke sepeda motor dengan membawa 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, kemudian Muhammad Hamzah Almakassari (DPO) langsung naik sepeda motor dan menyuruh terdakwa segera pergi, bersamaan dengan hal tersebut, terdakwa mendengar saksi korban Asriani Musa berteriak "palukka !, palukka !", sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa terjatuh.

- 6) Bahwa benar saat terdakwa dan Muhammad Hamzah Almakassari (DPO) terjatuh, Muhammad Hamzah Almakassari (DPO) langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor dan 3 (tiga) buah tabung gas dan terdakwa, sehingga saat itu yang tertangkap oleh warga hanyalah terdakwa beserta sepeda motor dan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg.

Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan tersebut di atas, dan tidak ada lagi keterangan lain yang akan ditambahkan.

Dari keterangan para saksi antara satu dengan yang lainnya telah ditemukan persesuaian dan saling berhubungan, serta dibenarkan oleh terdakwa Randa Putra Suranda Mangka dan temannya Muhammad Hamzah Almakassari (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama.

Hal ini diperkuat oleh barang bukti berupa 3 (buah) tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, dan 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DD2133Q.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa, dan terdakwa membenarkannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah memungkinkan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

6. Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan

Sebelum Hakim/Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Randa Putra Suranda Mangka, terlebih dahulu mempertimbangkan masukan yang bersumber dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar yang ditandatangani oleh Kepala Bapas Kelas I Makassar Sudiyo, Bc.IP, S.Sos dan Pembimbing Pemasyarakatan Burhanuddin, SH.

Merujuk kepada surat dari Kepala Kepolisian Sektor Tamalate Makassar perihal permintaan Penelitian Kemasyarakatan terdakwa "Anak" atas nama Randa Putra Suranda Mangka (17 tahun), dengan No.B/22/2013/Reskrim menyampaikan surat permintaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk menjadi bahan pertimbangan hakim dalam persidangan anak di Pengadilan Negeri Makassar.

Hasil-hasil Penelitian Kemasyarakatan dapat diberi rangkuman sebagai berikut :

a. Riwayat Hidup Terdakwa

1) Riwayat pertumbuhan dan perkembangan terdakwa:

- a) Menurut keterangan kakak kandung terdakwa yang bernama Girda Ayu (Pr) bahwa orang tua (ibu), selama terdakwa berada dalam kandungan ibunya baik masih menjadi janin maupun sudah menjadi bayi, ibu terdakwa tidak pernah merasakan sakit, atau mendapatkan suatu penyakit yang dapat membahayakan kandungannya, hingga terdakwa dilahirkan dalam keadaan normal di rumah bersalin di Jakarta pada tanggal 22 April 1995.
- b) Sejak kelahiran terdakwa diasuh dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya, lalu di sekolahkan di SD Negeri 02 Petang

Jakarta Utara. Pada saat terdakwa duduk di Kelas V SD terdakwa pindah ke Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan dan diasuh oleh pamannya, lalu disekolahkan kembali di SD Negeri 3 Sinjai salah satu sekolah unggulan di Kecamatan Balanipa Kabupaten Sinjai. Setelah lulus SD maka terdakwa melanjutkan sekolahnya pada SMP Negeri 2 Sinjai, namun pada saat Kelas I SMP pindah pada SMP LPP UMI Jalan Kakatua Makassar dan diasuh oleh kakaknya hingga tamat, dan setelah itu terdakwa melanjutkan sekolah dan pindah di Bandung dan masuk SMA Al Azhar Padalarang Kabupaten Bandung sampai Kelas I dan diasuh oleh pamannya. Tidak lama kemudian terdakwa pindah lagi ke Makassar dan kembali diasuh oleh kakaknya lalu disekolahkan di SMA LPP UMI Makassar hingga Kelas II kemudian berhenti. Setelah itu terdakwa bekerja namun tidak lama terdakwa berhenti dari pekerjaannya hingga terdakwa mendapat kasus hukum.

2) Riwayat kesehatan terdakwa

Secara fisik dan mental terdakwa mengalami perkembangan kesehatan yang baik, dan belum pernah menderita penyakit yang dapat mengganggu perkembangan pertumbuhan fisik dan jiwanya, termasuk penyakit yang dapat membahayakan dan menular terhadap orang lain.

3) Riwayat pendidikan terdakwa

- a) Pendidikan formal terdakwa mulai dari SD hingga SMA Kelas II selalu berpindah-pindah lalu berhenti dan tidak tamat SMA.
- b) Selama sekolah di SD hingga terdakwa melanjutkan sekolah si SMA dan berhenti di Kelas II, terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan non formal.

4) Riwayat pekerjaan terdakwa

Selama terdakwa berhenti sekolah pernah bekerja di Panakukang Mall selama 3 (tiga) bulan dan berhenti lagi hingga terdakwa bermasalah dengan hukum dan tidak bekerja lagi.

5) Riwayat pelanggaran hukum terdakwa

Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum, namun dalam kasus ini terdakwa baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum dengan ikut terlibat melakukan pencurian tabung gas bersama dengan temannya, hingga terdakwa diproses secara hukum.

b. Kondisi Keluarga

1) Riwayat pernikahan orang tua terdakwa

Orang tua terdakwa melangsungkan pernikahannya menurut ajaran agama Islam di Jakarta pada tahun 1990 atas dasar suka sama suka yang mana masing-masing masih bestatus jejak dan gadis, dan dapat dukungan dari keluarga kedua belah pihak. Kemudian hubungan pernikahan mereka berlangsung dengan baik. Atas perkawinan orang tua terdakwa di karuniai 2 (dua) orang anak yang terdiri dari perempuan 1 (satu) orang yaitu kakak terdakwa, dan 1 (satu) orang lainnya yaitu terdakwa sebagai anak kedua.

2) Pola pengasuhan orang tua terdakwa

Sejak terdakwa lahir ia diasuh dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya, namun orang tua terdakwa pada saat berusia 11 (sebelas) tahun, orang tuanya memindahkan sekolah di Makassar Sulawesi Selatan, lalu diasuh oleh kakak dan pamannya dengan cara mendidik, membina sikap dan perilaku yang baik, baik dalam lingkungan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat, sehingga terdakwa dapat berbakti kepada kedua orang tua dan berlaku sopan, begitu juga terdakwa dalam bergaul dengan teman-teman di lingkungannya dapat menyesuaikan diri dan saling membela diantara mereka apabila terjadi permasalahan terhadap orang lain.

3) Hubungan sosial kakak/wali terdakwa dengan masyarakat

Kakak/wali terdakwa dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat di sekitar dalam lingkungan Perumahan Puri Taman Sari Makassar. Hubungan wali terdakwa dengan masyarakat berjalan cukup baik, rukun dan damai, serta saling membantu bila ada warga masyarakat yang membutuhkan bantuan dan saling mendukung baik yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat sosial kemasyarakatan.

4) Keadaan ekonomi keluarga terdakwa

Keadaan ekonomi keluarga/wali/kakak terdakwa berada pada kelompok ekonomi orang yang mampu, kakak terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Sampoerna Tbk Cabang Makassar, oleh karena itu kebutuhan sehari-hari cukup terpenuhi

c. Tanggapan Terdakwa

- 1) Tanggapan/sikap penyesalan terdakwa terhadap pelanggaran dan proses hukum yang dijalani.

Terdakwa menyesal atas perbuatan tindak pidana pencurian tabung gas yang dilakukan bersama dengan temannya. Oleh karena itu terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang kedua kalinya.

- 2) Tanggapan dan penilaian terdakwa terhadap kesalahannya
 - a) Terdakwa merasa bersalah karena mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya, oleh karena itu korban melaporkan terdakwa kepada yang berwajib untuk diproses secara hukum.
 - b) Terhadap korban, keberatan sehingga tetap mengharapkan perma-salahan ini agar dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - c) Terhadap keluarga terdakwa, wali/kakak kandung ketika mengetahui permasalahan hukum yang dijalani adiknya di Kepolisian Sektor Tamalate Makassar, keluarga sangat repot mengurus permasalahan terdakwa, namun demikian wali/kakak terdakwa pasrah menghadapinya. Oleh karena itu wali/kakak mengharapkan kepada penegak hukum agar terdakwa diberikan keringanan hukuman, agar terdakwa tidak rusak mentalnya apalagi terdakwa masih tergolong sebagai "anak di bawah umur".

d. Kebutuhan Terdakwa dan Masa Depan

- 1) Kebutuhan terdakwa

- a) Perlunya wali/kakak terdakwa sebagai tanggung jawab terhadap terdakwa lebih meningkatkan pengawasan dan menasehati terdakwa agar tidak lagi melakukan tindak pidana pencurian.
- b) Terdakwa kiranya perlu diberikan pemahaman bimbingan keagamaan sesuai ajaran agama Islam yang dianutnya, seperti mengikuti pengajian agar menjadi anak yang beriman dan bertaqwa, dan terhindar dari perbuatan yang tercela atau perbuatan yang melanggar hukum seperti melakukan pencurian.

- 2) Masa depan terdakwa

- a) Terdakwa berharap proses hukumnya secepatnya bisa selesai agar tidak lagi memikirkan permasalahannya, dalam

hal ini termasuk hukuman yang akan diterimanya kelak dalam putusan pengadilan.

- b) Lagi pula terdakwa akan berusaha bila kembali kepada orang tuanya di Jakarta. Bila perlu orang tua akan menyekolahkan kembali yang sempat terputus karena berhenti sekolah di Kelas II SMA di Makassar.

e. Tanggapan TPP Bapas

Pada dasarnya sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar, menerima saran dan pendapat yang dikemukakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, yaitu: "terdakwa yang bernama Randa Putra Suranda Mangka dikembalikan kepada orang tuanya, atau sebaliknya terdakwa diserahkan kepada Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makasar untuk dibina, dididik dan diberi keterampilan, agar terdakwa nantinya bisa berguna untuk bangsa dan negara, demi masa depannya". dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa nantinya bila selesai mengikuti pelatihan sesuai dengan bakat yang dimilikinya, maka terdakwa akan mencari pekerjaan dan mempergunakan ilmu yang diperoleh selama dalam pendidikan dan pelatihan demi masa depannya.
- 2) Terdakwa perlu diberikan bimbingan keagamaan seperti bimbingan agama Islam, agar terdakwa kuat iman, sabar menghadapi masalah yang telah menimpa dirinya seperti saat ini.

f. Analisa Masalah Terdakwa

- 1) Terdakwa Randa Putra Suranda Mangka adalah anak kedua dari dua bersaudara, terdakwa memang lahir di Jakarta, kemudian disekolahkan oleh kedua orang tuanya di SD Negeri 02 Petang Jakarta Utara. Pada saat terdakwa Kelas V SD, terdakwa pindah ke Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan, lalu disekolahkan di SD Negeri 3 (Unggulan) Kecamatan Balanipa Kabupaten Sinjai. Setelah lulus SD, melanjutkan sekolah di SMP Negeri 2 Sinjai, namun pada saat Kelas I SMP pindah lagi pada SMP LPP UMI di Jalan Kakatua Makassar hingga tamat. Setelah itu terdakwa pindah ke Bandung dan melanjutkan sekolah di SMA Al Azhar di Padalaran Kabupaten Bandung sampai Kelas I. Tidak lama kemudian pindah lagi ke Makassar dan masuk di SMA LPP UMI hingga Kelas II dan berhenti sekolah. Ketika terdakwa putus sekolah di kelas tersebut ia bekerja di Pnakukan Mall selama 3 (tiga) bulan, kemudian keluar, lalu pindah lagi bekerja di Warkop Panakukang selama 3 (tiga) bulan dan kemudian berhenti lagi bekerja. Setelah itu terdakwa terlibat pencurian bersama temannya, sehingga diproses secara hukum.

- 2) Dari segi ekonomi keluarga terdakwa
 Keluarga/wali/kakak kandung terdakwa termasuk keluarga mampu dan bekerja sebagai karyawan pada PT. Sampoerna Tbk Cabang Makassar dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya termasuk terdakwa.
- 3) Pihak masyarakat di lingkungan tempat tinggal terdakwa
 Masyarakat di ltempat tinggal terdakwa di Komplek Perumahan Puri Taman Sari Makassar, mengharapkan agar terdakwa bila selesai masalahnya tidak lagi berbuat tercela dan menyesali perbuatannya, karena perbuatan pencurian itu tidak dapat dibenarkan karena melanggar hukum dan cukup meresahkan warga masyarakat.
- 4) Terdakwa telah melakukan pencurian tabung gas
 Terdakwa bersama temannya telah melakukan pencurian tabung gas di toko yang terletak di Jalan Dg Tata 1 Blok 4 No.70 Makassar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
- 5) Pengakuan terdakwa
 Menurut pengakuan terdakwa bahwa pada saat melakukan pencurian tabung gas, terdakwa tidak terlibat langsung, melainkan temannya yang langsung masuk ke dalam toko lalu mengambil 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, ketika itu terdakwa hanya menunggu di luar toko, setelah teman terdakwa keluar dari toko sambil membawa tabung gas, maka terdakwa terus langsung membunyikan sepeda motornya lalu menancap gasnya, namun karena sepeda motor oleng dan jatuh maka terdakwa tertangkap.
- 6) Keinginan korban
 Korban berharap kepada pihak penegak hukum agar terdakwa diberi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

g. Kesimpulan/Rekomendasi TPP Bapas

Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil pemeriksaan/penyelidikan Kepolisian Sektor Tamalate, dalam hal ini Penyidik Reskrim terdakwa diduga melakukan tindak pidana pencurian tabung gas dikenai Pasal 363 ayat (1) ke-4 . KUHP.
- 2) Terdakwa terlibat melakukan pencurian di toko tersebut yang pada saat itu membonceng temannya yang bernama Muhammad Hamzah Almakassari yang pada saat itu merencanakan pencurian tersebut.
- 3) Bila dilihat secara fakta maka perbuatan yang dilakukan terdakwa mutlak kesalahannya melakukan pencurian, oleh karena itu maka terdakwa telah ditangkap dan sekaligus ditahan

oleh Kepolisian Sektor Tamalate untuk menjalani proses hukum sebagaimana mestinya.

- 4) Pihak korban merasa keberatan sehingga tetap mengharapkan permasalahan ini agar dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 5) Masyarakat di lingkungan tempat tinggal terdakwa Kompleks Perumahan Puri Taman Sari Makassar mengharapkan agar supaya terdakwa nantinya bila selesai masalahnya, agar tidak berbuat lagi dan dapat menyesali perbuatannya, karena perbuatan terdakwa tidak dapat dibenarkan secara hukum dan telah meresahkan masyarakat.
- 6) Pihak pemerintah setempat di Kompleks Perumahan Puri Taman Sari Makassar dalam hal ini Ketua RT setempat yang tidak membenarkan perbuatan terdakwa dan sekaligus mengharapkan agar orang tua/wali/kakak kandungnya mengawasi terdakwa dengan sebaik-baiknya agar tidak mengulangi perbuatannya yang dapat meresahkan masyarakat.
- 7) Pada saat ini langkah yang tegas lewat penegakan hukum untuk menyikapi permasalahan terdakwa, perlu kiranya mendapat tindakan atau sanksi terhadap terdakwa, melakukan pembalasan lewat penghukuman, tetapi lebih tepat kepada pendekatan pembinaan moral yang sifatnya mendidik, membimbing dan mengayomi terdakwa, agar dapat menjadi anak yang berguna di dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungannya, serta berbakti kepada orang tua di masa yang akan datang.

h. Saran Kepada Hakim

Tanpa mengurangi hak dan wewenang dalam menyidangkan perkara terdakwa atas nama Randa Putra Suranda Mangka, maka Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat dan menyarankan kepada Hakim dalam persidangan ini bahwa: "Setelah menganalisa dan masalah yang dihadapi terdakwa, dan melihat beberapa aspek hukum dan berkaitan dengan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa, serta berdasarkan hasil-hasil konsultasi dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013, maka saat ini terdakwa perlu mendapat pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, oleh sebab itu terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya atau diserahkan kepada Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar untuk dididik, dibina atau dibekali suatu keterampilan yang dapat bermanfaat bagi terdakwa yang nantinya kembali ke tengah-tengah masyarakat, di bawah pengawasan Kementerian Hukum dan Hak-hak Azasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar bekerja sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia

Provinsi Sulawesi Selatan dan Komite Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Provinsi Sulawesi Selatan", atau pendapat lain dari Hakim untuk kepentingan terbaik bagi anak, dengan sudut pandang sebagai berikut:

1) Dilihat dari segi yuridis

- a) Berdasarkan kepada ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a dan c Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi: huruf a "Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah mengembalikan kepada orang tua atau wali", huruf c "Tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal ialah menyerahkan kepada Kementerian Sosial atau Organisasi Sosial Masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja".
- b) Serta mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 /2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi: "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya"

2) Dilihat dari segi terdakwa

Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang melanggar hukum berupa tindak pidana pencurian tabung gas milik orang lain bersama-sama dengan temannya, untuk itu terdakwa akan bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan menjalani proses hukum di Kepolisian Sektor Tamalate.

3) Dilihat dari pihak korban

Korban yang merasa dirugikan mengatakan bahwa ia keberatan atas pencurian tabung gas miliknya sehingga tetap mengharapkan permasalahan ini agar dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

4) Dilihat dari segi psikologi

Secara kejiwaan atau psikologi dengan pengenaan saksi hukum atau tindakan yaitu, dikembalikan kepada orang tua/wali, atau diserahkan kepada Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar, akan berdampak jauh lebih baik dari pada dijatuhi sanksi peng-hukuman yang harus dibina dalam instansi khusus seperti penjara anak, terutama untuk menghindarkan dari tekanan mental psikologis ataupun pandangan yang negatif dari warga masyarakat setempat terhadap terdakwa.

5) Dilihat dari kepentingan sosial masyarakat

Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum, karena telah melakukan tindak pidana pencurian yang merugikan orang lain sehingga ia ditangkap warga setempat kemudian diproses hukum di Kepolisian Sektor Tamalate.

6) Dilihat dari segi orang tua terdakwa

Selama ini orang tua terdakwa telah melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap terdakwa, dan bahkan mengoptimalkan kemampuannya demi menumbuhkan kesadaran bagi terdakwa, sehingga terdakwa dapat kembali menjadi bagian dari anggota keluarga dan masyarakat, dan dapat tercapai cita-citanya bila selesai menjalani hukumannya akan kembali ke orang tuanya di Jakarta untuk disekolahkan lagi sampai tamat SMA bahkan bisa saja lanjut ke perguruan tinggi.

7) Dilihat dari segi pemerintah setempat

Pihak pemerintah setempat di Kompleks Perumahan Puri Taman Sari Makassar yang dalam hal ini Ketua RT, menegaskan bahwa tidak membenarkan perbuatan terdakwa, dan lebih mengharapkan agar wali atau kakak kandung terdakwa dapat mengawasi, membina dan membimbingnya, agar terdakwa tidak lagi melakukan atau mengulangi perbuatannya yang sudah pasti dapat meresahkan warga masyarakat setempat.

8) Demikian Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Linmas) yang disusun berdasarkan pengamatan, data-data, dan keterangan yang diterima dari terdakwa, keluarga, warga masyarakat, dan pemerintah setempat dengan harapan semoga laporan ini dapat diperguna-kan sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

7. Amar Putusan

Putusan Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Randa Putra Suranda Manga, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- a. Menyatakan terdakwa Randa Putra Suranda Manga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan"
- b. Menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa Randa Putra Suranda Manga dengan menyerahkan kepada Kementerian Sosial dalam hal ini Panti Asuhan Marsudi Putra Toddopuli Makassar untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja selama 7 (tujuh) bulan.

- c. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan diperhitungkan dari masa terdakwa mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut.
- d. Memerintahkan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg dikembalikan kepada saksi korban Asriani Musa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DD 2133 Q warna hitam dikembalikan kepada saksi Rionaldi Welliam Lahiyu.
- e. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Amar putusan No.206/Pid.B/2013/PN-Mks, diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 oleh H. Makmur, SH, MH sebagai hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dan dibantu oleh Nuriya Awad, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Haerana AN Jaya, SH Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa serta pegawai dari Balai Pemasyarakatan (Bapas).

8. Analisis Penulis

Sesuai dengan hasil penelitian penulis yang menunjukkan bahwa penerapan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 206/Pid.B/2013/PN-Mks, adalah sudah tepat oleh karena: "Perbuatan terdakwa Randa Putra Suranda Mangka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana, adalah terbukti".

Bahwa terdakwa didakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk kumulatif atau bersesuaian, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menetapkan pasal dan ayat yang dapat dibuktikan sesuai dengan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP,

dengan pertimbangan hukum bahwa perbuatan terdakwa telah dilakukan secara terang-terangan dalam lingkungan masyarakat setempat, sesuai dengan keterangan saksi korban sebagai pelapor, dan 2 (dua) orang saksi lainnya. Semuanya memberikan keterangan yang bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya.

Tempat terjadinya perkara (*locus delicti*) tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu di toko milik Ariani Musa yang terletak di Jalan Dg Tata 1 Blok 4 No. 70 Makassar. Karena itu dalam persidangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, demi keadilan dan kebenaran atas nama Tuhan Yang Maha Esa, hanya menjatuhkan amar putusan yang sesuai dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan baik keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menemukan alat bukti atau petunjuk, bahwa tempat kasus (*locus delicti*) sudah jelas telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yang masih tergolong di bawah umur yakni terdakwa Randa Putra Suranda Mangka (17 tahun).

Bahwa pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur yaitu: "barang siapa", "mengambil suatu barang", "sebagian atau seluruhnya milik orang lain", "dengan maksud untuk

memiliki secara melawan hukum", dan "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih". Setiap unsur dapat dibuktikan dan dijelaskan sebagai berikut:

a. Unsur "barang siapa"

Adapun yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu setiap orang atau badan hukum yang dipersamakan dengan orang yang dapat memper-tanggungjawabkan perbuatannya serta menunjuk kepada pelaku delik yang dirumuskan dalam surat dakwaan, dalam hal ini terdakwa Randa Putra Suranda Mangka dan Muhammad Hamzah Almakassari (DPO). Menurut keterangan saksi Asriani Musa dan Panca Indra Bakti Musa, bahwa terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 12.30 Wita di Jalan Dg Tata 1 Blok 4 No.70 Makassar. Keterangan saksi telah dibenarkan oleh terdakwa. Dengan demikian maka unsur "Brang siapa" telah terpenuhi.

b. Unsur "mengambil suatu barang"

Adapun yang dimaksud dengan mengambil suatu barang, yaitu membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya. Menurut keterangan saksi korban Asriani Musa bahwa 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg yang telah diambil oleh terdakwa dan Muhammad Hamzah Almakassari (DPO) di Jalan Dg Tata 1 Blok 4 No.70 Makassar. Keterangan para saksi dibenarkan oleh terdakwa. Dengan demikian maka unsur "mengambil suatu barang" telah terbukti dengan sah dan meyakinkan.

c. Unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain"

Adapun yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini menurut saksi korban Asriani Musa bahwa 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg yang diambil oleh terdakwa dan temannya adalah miliknya.

Keterangan saksi korban tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa. Dengan demikian maka unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terbukti.

d. Unsur "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Mengenai unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, menurut saksi korban Asriani Musa bahwa 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg tersebut diambil tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban, sehingga dimaksudkan telah melawan hukum. Keterangan saksi korban tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa. Dengan demikian maka unsur "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" telah terbukti.

e. Unsur "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih"

Sedangkan yang dimaksud dengan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih menurut keterangan terdakwa bahwa, Muhaammad Hamzah Almakassari (DPO) yang telah mengambil 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, sedangkan terdakwa Randa Putra Suranda Mangka yang menunggu di depan toko saksi korban Asriani Musa di Jalan Dg Tata 1 Blok 4 No. 70 Makassar.

Keterangan terdakwa telah bersesuaian dengan ditemukannya barang bukti berupa 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg telah menjadi alat bukti petunjuk dan terbukti dilakukan oleh 2 (dua) orang. Dengan demikian unsur "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih" telah terbukti. Berdasarkan uraian pembuktian unsur-unsur pasal yang telah didakwakan kepada terdakwa Randa Putra Suranda Mangka, secara sah dan meyakinkan menurut hukum, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, mende-
ngarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang terdiri atas:

- a. Keterangan saksi korban Asriani Musa menerangkan bahwa telah terjadi pencurian 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg miliknya yang dipajang depan tokonya di Jalan Dg Tata 1 Blok 4 No.70 Kota Makassar pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 12.30 Wita. Barang tersebut diambil oleh teman terdakwa Muhammad Hamzah Almakassari kemudian berlari naik sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan kemudian keduanya berboncengan melarikan diri sambil diteriaki saksi korban. Seorang pengendara sepeda motor dari arah berlawanan menghalangi terdakwa dan temannya membuat sepeda motor oleng dan terjatuh dan terdakwa tertangkap bersama barang curiannya. Sementara teman terdakwa berhasil melarikan diri dan dinyatakan DPO, dan sepeda motor disita sebagai barang bukti.
- b. Keterangan saksi Panca Indra Sakti Musa, menerangkan bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 12.30 Wita, di Jalan Dg Tata 1 Blok 4 No.70 Makassar dimana saksi berada dalam toko dan mendengar saksi korban meneriaki terdakwa dan temannya, dan melihat seorang pengendara sepeda motor dari arah berlawanan menghalangi terdakwa sehingga oleng dan terjatuh. Terdakwa tertangkap bersama barang bukti tabung gas dan sepeda motor yang segera diserahkan kepada Kepolisian Sektor Tamalate untuk menjalani proses hukum, sementara saksi melihat teman terdakwa melarikan diri dan tidak tertangkap dinyatakan DPO.

- c. Keterangan saksi Ronaldi William Lahiwu, mengatakan bahwa benar teman terdakwa bernama Hamzah Muhammad Almakassari meminjam sepeda motor Honda Beat DD 2133 Q warna hitam miliknya untuk pulang ke rumah ganti pakaian dan singgah membeli rokok di toko bersama dengan terdakwa. Kemudian terdakwa yang membonceng temannya Muhammad Hamzah Almakassari dan terjadilah peristiwa pencurian tersebut. Oleh karena teman terdakwa berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap oleh warga, maka teman tersangka tersebut menemui saksi dan menyampaikan bahwa telah mencuri 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg di toko milik saksi korban di Jalan Dg Tata 1 Blok 4 No.70 Makassar, namun karena terdakwa tertangkap dan Muhammad Hamzah Almakassari melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor saksi yang disita kepolisian sebagai barang bukti.
- d. Keterangan terdakwa Randa Putra Suranda Mangka menerangkan bahwa, terdakwa mengakui dalam persidangan bahwa secara bersa-sama telah mengambil 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg milik korban Asriani Musa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 12.30 Wita di Jalan Dg Tata 1 Blok 4 No.70 Makassar, Awainya teman terdakwa Muhammad Hamzah Almakassari meminjam motor milik saksi Rionaldi Welliam Lahiwu, kemudian terdakwa membonceng temannya menuju toko dan berhenti untuk membeli rokok, sementara terdakwa menunggu di depan toko, tak lama kemudian teman terdakwa keluar dari toko membawa tabung gas dan langsung naik sepeda motor yang dikendarai terdakwa, kemudian segera menancap gas melarikan diri, namun nas motor oleng dan terjatuh, karena dihambat oleh salah seorang pengendara sepeda motor dari arah berlawanan. Akhirnya terdakwa tertangkap warga, sementara temannya melarikan diri meninggalkan terdakwa, tabung gas dan sepeda motor untuk dijadikan barang bukti di pengadilan.

Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa tersebut saling bersesuan dan dapat disimpulkan bahwa, semua unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dengan sah menurut hukum. Karena itu terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum agar dijatuhi hukuman pidana penjara selaman 7 (tujuh) bulan potong masa tahanan, barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, serta membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Mencermati tuntutan sanksi hukum sesuai pasal yang didakwakan terhadap terdakwa Randa Putra Suranda Mangka yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih", Diancam dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat minim yakni 7 (tujuh) bulan yang mengedepankan prinsip perlindungan anak.. Sehubungan dengan itu Gultom (2010 : 128) menjelaskan bahwa;

Ancaman pidana penjara terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak paling lama Vz (seperdua) tahun dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Meskipun demikian Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam menjatuhkan putusannya tetap memperhatikan pasal KUHP tersebut, dan menerapkan Pasal 24 ayat (1) huruf a dan c UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi:

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah mengembalikan kepada orang tua atau orang tua wali. Tindakan yang dijatuhkan kepada anak ialah menyerahkan kepada Kementerian Sosiai, atau Organisasi Sosiai Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Karena itu sangat tepat amar putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Randa Putra Suranda Mangka (17 tahun) dengan putusan tindakan bagi terdakwa dengan menyerahkan kepada Kementerian Sosiai dalam hal ini Panti Sosiai Marsudi Putra Toddopuli Makassar untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja selama 7 (tujuh) bulan.

Amar putusan hakim tersebut menunjukkan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar, hanya sebagian yang dikabulkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Makassar yakni: "Menyatakan bahwa terdakwa Randa Putra Suranda Mangka bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan tunggal, menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Asriani Musa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DD 2133 Q warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya saksi Rinaldi Welliam Lahawu dan menetapkan terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 2 000,- (dua ribu rupiah)".

Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang tidak dikabulkan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yaitu: "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Randa Putra Suranda Mangka dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahun". Kemudian Hakim menggantinya dengan putusan yaitu: "Menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa Randa Putra Suranda Mangka dengan menyerahkan kepada Kementerian Sosial yakni Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar untuk mengikuti pendidikan pembinaan dan pelatihan kerja selama 7 (tujuh) bulan, dan menetapkan lama terdakwa dalam tahanan dipemitungkan dari masa terdakwa mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja tersebut".

Hakim tidak menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Randa Putra Suranda Mangka (17 tahun) sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum, setelah memperhatikan beberapa pasal yang terkait dengan peradilan dan perlindungan anak yang masih di bawah umur, dan juga mempertimbangkan masukan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar, yang merujuk pada Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi; "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya".

Karena itu Hakim Tunggal anak yang mengadili dan memutus perkara ini tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, melainkan menjatuhkan tindakan dengan menyerahkan terdakwa kepada Kementerian Sosial dalam hal ini Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar. Putusan sanksi hukum berupa tindakan menyerahkan terdakwa kepada panti sosial, jauh lebih baik dan bermanfaat untuk memperbaiki, mengembangkan keterampilannya dalam menyongsong masa depannya, dari pada terdakwa diberi saksi kukum pidana penjara yang kurang tepat dijatuhkan kepada anak yang masih tergolong di bawah umur 18 tahun.

Dengan demikian maka putusan hakim tersebut telah mencerminkan rasa keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak, demi pembinaan anak nakal yang memang sangat membutuhkan bimbingan mental kerohanian, kepribadian sosial, dan keterampilan kerja yang memadai.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak

Pertimbangan hukum Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Makassar menarik untuk dicermati dalam bentuk komentar penulis, dengan maksud agar menghasilkan suatu kesimpulan penerapan hukum yang baik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum pidana, terutama menyakuti Putusan No.206/Pid.B/2013/PN.Mks yang telah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013.

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Putusan hakim yang juga disebut putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa putusan hakim adalah merupakan salah satu faktor penting dalam menyelesaikan suatu perkara pidana di pengadilan. Karena itu hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah mengedepankan sikap kehati-hatian, agar amar putusan yang

ditetapkannya benar-benar mencerminkan rasa keadilan.

Hakim memilih salah satu dari tiga macam putusan yaitu: Pertama, putusan bebas (*prisjpraak*) dapat diambil apabila salah satu unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti. Kedua, putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alie rechtsvervoiging*) jika perbuatan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum tetapi perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, dan Ketiga putusan pemidanaan (*veroordeling*) apabila semua unsur pasal dalam dakwaan dan mengungkap fakta-fakta dalam persidangan pengadilan.

Hakim dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran yang berdasarakan Tuhan Yang Maha Esa selalu memperhatikan Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-undang Hkum Acara Pidana yang berbunyi:

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaiannya antara satu saksi dengan yang lain.
- b. Persesuaian antara saksi dengan alat bukti lainnya.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Karena itu selama dalam persidangan tidak ada hal-hal yang yang dapat meringankan terdakwa dari pertanggungjawaban terdakwa, baik dalam alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar. Untuk itu hakim dapat berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sebab itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang didakwakan kepadanya. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili

perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut:

Randa Putra Suranda Mangka, umur 17 tahun, lahir di Jakarta tanggal 22 April 1995, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, suku Bugis, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Kelas II SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan di rutan sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai sekarang (05 Maret 2013). Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dan menyatakan bahwa dalam persidangan ini akan menghadapi sendiri.

Pengadilan Negeri Makassar tersebut

Setelah membaca;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar No.2Q6/Pid.B/2Q13/ PN.Mks tanggal 05 Februari 2013 tentang penunjukan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar No.206/Pid.B/2013/PN.Mks tanggal 7 Pebruari 2013 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara atas nama Randa Putra Suranda Mangka beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa Randa Putra Suranda Mangka telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Randa Putra Suranda Mangka dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
- c. Menyerahkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg dikembalikan kepada saksi korban Asriani Musa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DD 2133 Q warna hitam dikembalikan kepada saksi Rionaldi Welliam Lahiyu;
- d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya, terdakwa mohon keringanan, karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah didakwa, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu: 1) Asriani Musa, 2) Panca Indra Sakti Musa, SE. 3) Rionaldi Welliam Lahiyu, sesuai berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Randa Putra Suranda Maka sebagaimana yang telah termuat selengkapnya dalam berita acara.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal maka hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur barang siapa;
- Unsur mengambil sesuatu barang;
- Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- Unsur dengan maksud untuk memiliki;
- Unsur dengan melawan hukum; dan
- Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, dan 1 (satu) unit motor Honda Beat DD 2133 Q warna hitam.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, ternyata antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan tersebut, dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 363 a.yat (1) ke-4 KUUHP.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dalam persidangan perkara ini, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, oleh karenanya hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa menurut Hakim, bahwa "hukuman badan yaitu pidana penjara tidak tepat diterapkan kepada terdakwa", oleh karena itu hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai jenis hukuman kepada terdakwa. Karena menurut Hakim, terdakwa "hukuman yang dijatuhkan berupa tindakan", dimana terdakwa ditempatkan sebagai "anak negara" untuk dididik dan dibina oleh negara dengan menempatkan/ menyerahkan kepada Kementerian Sosial yaitu Panti Sosial Marsudi Toddopuli Makassar untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja.

Menimbang bahwa Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa petahanan terdakwa dalam tahanan tetap akan diperhitungkan dari masa terdakwa mengikuti pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah maka harus dibebani kewajiban untuk membayar ongkos atau biaya perkara.

Menimbang bahwa sebelum hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan semua hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang memberatkan:
 - 1) Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi pihak korban;
 - 2) Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan terhadap warga masyarakat setempat
- b. Hal-hal yang meringankan:
 - 1) Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - 2) Terdakwa belum pernah dihukum;
 - 3) Terdakwa masih berusia muda.

Demikianlah pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah dilakukan seermat mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Oleh sebab dampak dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yang dikategorikan sebagai anak nakal, telah meresahkan masyarakat khususnya warga di sekitar

kediaman terdakwa, dan juga warga di sekitar tempat kejadian perkara, dimana perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

2. Komentor Penulis

Berbagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan amar putusannya, belum tentu mencerminkan rasa keadilan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berperkara. Karena perbuatan terdakwa cukup meresahkan masyarakat setempat, karena melakukan pencurian dengan pemberatan yang sudah pasti melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dimana semua unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, akan tetapi tuntutan pidana atas perbuatan terdakwa tidak sependapat dengan Hakim yang dikemukakan dalam persidangan.

Karena itu Hakim berpendapat bahwa hukuman badan dengan pidana penjara tidak tepat diterapkan kepada terdakwa, karena menurut Hakim hukuman yang dapat ditimpakan kepada terdakwa lebih tepat berupa tindakan, dimana terdakwa sebagai anak yang tergolong dibawah umur perlu diserahkan kepada Kementerian Sosial dalam hal ini Panti Sosial Marsudi Putra ToddGpyli Makassar, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan c UU No.23 Tahun 2002 tentang Pengadilan Anak, bahwa; Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah mengembalikan kepada orang tua atau wali, dan menyerahkan kepada Kementerian Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Karena itu putusan tindakan yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah tepat.

Sehubungan terdakwa yang tidak dijatuhi hukuman pidana penjara, melainkan dijatuhi tindakan dengan menyerahkan kepada Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar untuk dididik, dibina, dan diberi pelatihan kerja. Merujuk kepada Keputusan Mahkamah Konstitusi RI NO.1/PUU-VIII/2010 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menetapkan bahwa: Perubahan batas usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah kawin. Selanjutnya dalam pasal 23 ayat (2) huruf a UU Pengadilan Anak telah memberikan beberapa alternatif pidana dan tindakan, selain pidana penjara yakni pidana kurungan, denda dan pengawasan, Dalam hal ini keberadaan pidana penjara bukan merupakan satu-satunya pilihan hakim dalam menjatuhkan amar putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian dalam Pasal 31 ayat (1) UU tersebut adalah penegasan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan keharusan aparat hukum untuk tidak menempatkan anak yang bersalah di Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa melainkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Oleh karena lembaga tersebut belum ada di Kota Makassar, maka hakim yang mengadili dan menjatuhkan amar putusan dalam perkara ini dengan tindakan yang menyerahkan terdakwa Randa Putra Suranda Mangka usia 17 tahun kepada Kementerian Sosial yaitu Panti Sosial Marsudi Putra Toddopula Makassar. Dengan demikian amar putusan tersebut tepat dan bijaksana demi masa depan terdakwa.

Mengenai putusan hakim yang menyangkut lamanya terdakwa dalam tahanan diperhitungkan dari masa terdakwa mengikuti pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja adalah sudah tepat dan sangat bijaksana, karena terdakwa telah mengaiami penahanan di rutan mulai dari penyidik Kepolisian Sektor Tamalate dan Jaksa Penuntur Umum Kejaksaan Negeri Makassar, serta Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan 05 Maret 2013 ketika jatuh vonis, sehingga total masa tahanan 65 (enam puluh lima) hari. Dengan demikian vonis berupa tindakan 7 (tujuh) bulan yang dijatuhkan oleh hakim, maka yang masih harus dijalani oleh terdakwa adalah kurang lebih 5 (lima) bulan 5 (lima) hari atau 163 (seratus enam puluh tiga) hari dan bebas tanggal 05 Agustus 2013 apabila bertindak •Selanjutnya mengenai putusan hakim yang memerintahkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg dikembalikan kepada saksi korban Asriani Musa. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DD 2133 Q warna hitam dikembalikan kepada saksi Rionaldi Welliam Lahiyu, adalah juga sudah tepat, sehingga tidak lagi merugikan secara materil kedua pemilik barang bukti tersebut.

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Randa Putra Suranda Mangka sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Adalah juga sudah tepap, karena sanksi pembayaran dengan uang sebesar itu tidak memberatkan terhukum untuk ditunaikan. Meskipun demikian pembayaran itu tidak boleh dianggap remeh karena sudah merupakan tetetapan hukum.

Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam putusan tersebut sehingga perlu diberi sanksi hukum, yakni perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi pemiliknya yakni saksi korban dan saksi lainnya. Meskipun dalam putusan hakim kedua jenis barang bukti berupa tabung gas dan sepeda motor tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya. Namun kerugian lainnya masih tetap ditanggung oleh kedua saksi tersebut, yakni kerugian ongkos/biaya, waktu, tenaga, pikiran dan moril selama dalam proses penyelesaian perkara. Perbuatan terdakwa juga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, hal ini nampak dalam komentar warga dan Ketua RT di lingkungan terdakwa berdomisili dan tempat kejadian perkara, yang pada pokoknya meminta agar terdakwa dihukumm sesuai dengan undang-undang yang berlaku Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga dihukum dengan tindakan pembinaan, adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu. Hal ini perlu diapresiasi semoga tetap bertaubat kepada Allah SWT. Terdakwa belum pernah dihukum, yang mengindikasikan bahwa baru kali ini terlibat pelanggaran yang tidak tergolong kejahatan. Terdakwa masih muda, masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang dapat dikategorikan bahwa terdakwa adalah anak yang masih dibawah umur dan perlu perlindungan hukum sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Apalagi selama dalam persidangan pengadilan terdakwa bersikap sopan, dan ada hadirin merasa ibah termasuk penegak kukum yang hadir dalam persidangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seluruh rangkaian hasil-hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak telah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Hal ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi korban dan kedua saksi lainnya maupun dari keterangan pengakuan terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan menerima hukuman yang ditimpakan kepadanya.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan pembinaan terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.205/Pid.B/2013/PN.Mks, telah sesuai dengan KUHP dan UU No.3 Tahun 1997 pula bahwa Saran dan Laporan Bapas D yang terkait, berdasarkan kerangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dengan dua alat bukti yang ditampilkan dalam persidangan. Pertimbangan hukum hakim dipertimbangkan oleh Hakim untuk menjatuhkan tindakan diserahkan kepada Panti Sosial Marsudi Putra Todddopuli Makassar. Mengenai hal yang meringankan meringankan dan

memberatkan terdakwa serta diperkuat keyakinan hakim yang mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dapat diberikan beberapa saran yang bersifat membangun sebagai berikut:

1. Putusan berupa tindakan yang menyerahkan terdakwa/terhukum dalam pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja dalam hal ini Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar, dapat membuat terdakwa/terhukum menganggap sangat ringan apabila di tempat pembinaan dan pelatihan kerja tersebut berlangsung kurang disiplin dan efektif. Karena itu disarankan agar fungsi pengawasan dalam lembaga tersebut benar-benar diintensifkan dan tidak dibolehkan terhukum keluar dari lembaga tanpa pengawasan yang ketat.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan amar putusa terutama dalam hal-hal yang memberatkan, hendaknya lebih diperketat lagi agar dapat menjatuhkan putusan tindakan di atas 7 (tujuh) bulan, guna lebih memaksimalkan lama pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja yang benar-benar mampu menciptakan mental dan pribadi mandiri serta keterampilan kerja yang mantap bagi terdakwa/terhukum, sehingga sekembalinya nanti dari pendidikan dan pelatihan tersebut lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dan sekaligus mendapat lagan kerja yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Alam, A. Syamsu. 1996. Pengantar Kriminologi, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Bonger, R. Thomas. 1991. Kriminologi, Suatu Pengantar. Bandung: Pustaka Pressindo Utama.
- Chazawi, Adam. 2005. Pelajaran Buku Pidana I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Didik, Wahjudi dan Gultom, Sirait. 2006. Perlindungan Hukum Hak-hak Anak. Jakarta: Raja Grafindo Utama.
- Djamhuri, Natakusumah. 2001. Perlindungan Atas Hak-hak Anak Dalam SidangAnak. Bandung: Pustaka Pressunda Utama.
- Djamil, M. Nasir. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Tentang Pembahasan Undang Undang Sistem Peradilan Anak, UU-SPPA). Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendy, Rusli. 1989. Asas Hukum Pidana Bagian 1. Ujung Pandang : Lembaga kriminologi Universitas Hasanuddin.
- , 1993. Asas Hukum Pidana Bagian 2. Ujung Pandang : Lembaga kriminologi Universitas Hasanuddin.
- Faried, Zainal Abidin. 1987. Asas-asas Hukum Pidana BagianPertama. Bandung: Alimni.
- Gultom, Mading. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Rafika Aditama.
- , 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Rafika Aditama.
- Hamzah, Chaerul. 2001. Anak Periu Pelindungan Hukum Dalam Sidang Peradilan Anak. Jakarta.' Akademika Pressino Jakarta: Akademika Pressino
- Hamzah, Andi. 2002. Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 1984. Deilik-delik Khusus. Bandung: Bina Cipta.

- Muniraf, Halim. 2000, Pembinaan Anak Sebagai Alternatif Mengatasi Kenakalan Anak Remaja. Jakarta: Akademika Pressindo
- Muiono, dkk. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Balai Pustaka.
- Marpaung, Leden. 2005. Asas Teori Praktek Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sianturi, S. R. 1996. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni Ahamaem-Petehaem.
- Siregar, Bismar, dkk. 1996. Hukum dan Hak-hak Anak. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia-CV. Rajawali.
- Soesilo, Oesman. 1998. Hukum Pidana di Indonesia Suatu Pengantar. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R. 1998. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Supramono, Ajis. 2007. Pehindungan Anak Dalam Sidang Anak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suseno, Sigid. 2012. Yuridiksi Tindak Pidana. Jakarta : Refika Aditama
- Poemomo, Hadiprasodjo. 1981. Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Prints, Darwan. 2002. Hukum Acara Pidana Dalam Praktek. Jakarta: Djambatan, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Puspa, Yan Pramadya. 1990. Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris. Semarang: CV. Aneka Indonesia.
- Pradjodikoro, Wirjono. 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung : Refika Aditama.
- Tonga, 2002. Hukum Pidana Materi. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.

Perundang-undangan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak.